

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
PELALAWAN DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI
(STUDI INDUSTRI BATIK BONO)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Tio Ardiyansyah
NPM : 157110736

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2019

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang tak terhingga penulis ucapkan, atas segala rahmat dan nikat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono)”**. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar sarjana stara satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan yang tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman, kritik dan saran serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari bahwasannya dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu, sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan banyak terimalasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Bapak Dr. H. Moris Yogiya, M,Si selaku Dekan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos, M.Si sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan teliti sebagaimana seharusnya penulisan Skripsi dan telah menyediakan waktu serta memberikan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
4. Lilis Suryani, S.Sos.,M.Si selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan penulis dan sangat membantu penlis dalam penyusunan Skripsi ini, serta motivasi yang diberikan kepada Penulis untuk kebaikan hasil akhir dari proses penulisan Usulan Penelitian.
5. H. Imam Ghazali, SH., MH selaku Dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Khususnya Jurusan Administrasi Publik yang telah memberikan pembelajaran dari wawasan yang beliau-beliau berikan selama masa perkuliahan aktif.

7. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Yang telah banyak membantu di bidang administrasi.
8. Terimakasih yang tulus Ananda kepada ayahanda Janur dan ibunda tercinta Suyanti yang telah memberikan do'a yang teramat tulus, kasih sayangnya, serta dukungannya dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S1) bidang Ilmu Administrasi Publik.
9. Terimakasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada rekan-rekan sepermainan Fharadila Anwar, Tomy Pamungkas, Sandy Baskara, Wiridona Rizky, Iesmanto, Ory Jefri Maulizon, Agung Irawan, Zayu Aprilo, Wisnu Mimbar Maulana yang telah memberikan banyak masukan serta semangat dalam mewujudkan skripsi ini. Terimakasih sudah banyak menemani dalam proses penyelesaian dan saat-saat direpotkan.
10. Dan kepada rekan-rekan lain yang sama-sama menggali ilmu dibangku kuliah khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membeikan saran, masukan, dan dukungan terhadap penyelesaian skripsi ini.

Penulis memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau yang berperan dalam penyelesaian usulan penelitian ini selalu diberikan rahmat dan karunia yang setimpal dengan apa yang telah Beliau berikan kepada penulis. Aamiin...

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 16 Desember 2019
Penulis,

Tio Ardiyansyah



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL	iv
BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan.....	17
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	19
A. Studi Kepustakaan.....	19
1. Konsep Administrasi Publik	19
2. Konsep Organisasi	23
3. Konsep Manajemen.....	26
4. Konsep Evaluasi.....	28
5. Konsep Pengembangan	30
6. Agen Pemberdayaan.....	37
7. Industri Kecil Menengah.....	38
B. Kerangka Pikir	40
C. Hipotesis.....	41

D. Konsep operasional	42
E. Operasional Variabel Penelitian.....	44
F. Teknik Pengukuran	45
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Tipe Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Populasi dan Sampel	53
D. Teknik Penarikan Sampel	54
E. Jenis dan Sumber Data	55
F. Teknik Pengumpulan Data.....	56
G. Teknik analisis Data	57
BAB IV DESKRIPSI LOKAL PENELITIAN	59
A. Gambaran umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Pelalawan	61
B. Kedudukan, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan	68
C. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan	86
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	88
A. Identitas Responden	88
1. Jenis Kelamin	89
2. Usia Responden.....	89
3. Pendidikan Responden	91
B. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan kabupaten Pelalawan	93
1. Pembinaan	93
2. Fasilitasi Sarana Dan Prasarana	99
3. Pengawasan	103
C. Hambatan-Hambatan Dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	

Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono).....	109
BAB VI PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN.....	116



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.I : Aspek Lingkungan Strategis.....	3
I.II : Jumlah Pengrajin Batik Bono rumah Batik andalan Tahun 2013-2019.....	15
II.I : Operasional Variabel Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono).....	44
III.I : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Tentang Pelaksanaan Tugas Pengembangan Industri Batik Bono	54
IV.I : Komposisi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Pelalawan Tahun 2016	62
IV.II : Kondisi Existing Sumber Daya ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Golongan Tahun 2016.....	63
IV.III : Kondisi Exiting Sumber Daya ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Tk. Pendidikan Tahun 2016	63
IV.IV : Kondisi Exiting Sumber daya PTT Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Tk. Pendidikan Tahun 2016	64
IV.V : Kebutuhan SDM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan.....	65
V.I : Distribusi Jumlah Responden Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dan Pengrajin Batik Bono Rumah Batik Andalan	89
V.II : Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Usia Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan	

	Perdagangan Kabupaten Pelalawan dan Pengrajin Batik Bono Rumah Batik Andalan	90
V.III :	Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dan Pengrajin Batik Bono Rumah Batik Andalan	92
V.IV :	Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pembinaan Pada Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono)	94
V.V :	Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden Terhadap Indikator Fasilitas Sarana dan Prasarana Pada Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono)	99
V.VI :	Distribusi Kualifikasi Jumlah Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pengawasan Pada Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mengengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono)	104
V.VII :	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Pelalawan.....	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.I : Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Pelalawan.....	11
I.II : Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Industri (studi Industri Batik Bono)	41
IV.I : Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuisioner Penelitian untuk Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan.....	117
2. Daftar Kuisioner penelitian untuk Pengrajin Batik Bono.....	122
3. Daftar Wawancara Kepala Dinas koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan.....	127
4. Daftar Wawancara Kepala Bidang Prindustrian.....	130
5. Daftar Wawancara Kasi Pengembangan Industri.....	133
6. Daftar Wawancara ketua Pengrajin Batik Bono.....	136
7. Data Telly Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Industri.....	139
8. Foto Dokumentasi Hasil Observasi	140
9. Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR No 01/UIR-Fs/Kpts/2019 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi a/n Tio Ardiyansyah	147
10. Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi No 1232/A_UIR/FS-5/2019 a/n Tio Ardiyansyah	148
11. Surat Rekomendasi Penelitian Fakultas Ilmu Sosiasl dan Politik No 266/E-UIR/27-FS/2019 Tentang Permohonan Riset.....	149
12. Surat Rekomendasi Pemerintah Provinsi Riau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/26503 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.....	150
13. Surat Rekomendasi Pemerintah Kabupaten Pelalawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No	

504/DPMPTSP/2019/191 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi	151
14. Surat Rekomendasi Riset Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan No 800/DKUKMPP-S/ Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi....	152



PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tio Ardiyansyah
Npm : 157110736
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Industri (studi industri batik Bono)

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada dengan kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa, seluruh persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benat telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Desember 2019
Pelaku Pernyataan,

Tio Ardiyansyah

“EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PELALAWAN DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI (STUDI INDUSTRI BATIK BONO)”

ABSTRAK

Tio Ardiyansyah

Kata Kunci : Evaluasi, Pengembangan, Industri

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam pengembangan industri batik Bono. Penelitian ini dilakukan dengan cara melihat evaluasi pelaksanaan tugas dalam pengembangan industri batik bono dari beberapa sudut pandang, yakni pembinaan, fasilitasi sarana dan prasarana, serta pengawasan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Industri (studi industri batik bono) belum efektif. Teknik pengukuran yang digunakan adalah Skala Likert melalui pendekatan dengan memberi skor nilai untuk setiap kategori ukuran. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan analisa data dengan menggunakan survey deskripsif dimana peneliti menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi pada saat penelitian dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh perumusan analisa terhadap masalah yang dihadapi kemudian dapat diambil suatu kesimpulan. Populasi dan sampel pada penelitian ini yakni seluruh pegawai Seksi Pengembangan Industri dan seluruh pengrajin batik Rumah Batik Andalan dengan menggunakan teknik seksus. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden yakni Kepala Seksi Pengembangan Industri serta seluruh Pengrajin batik Rumah Batik Andalan. Sedangkan data sekunder berupa buku-buku, dokumentasi resmi pemerintah yang diperoleh dari Seksi Pengembangan Industri dan Rumah Batik Andalan. Untuk pengumpulan data peneliti menggunakan kuisisioner, wawancara, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono) dapat disimpulkan pelaksanaannya berada pada rentang skor 195 dengan kategori Kurang Terlaksana. Yang artinya belum terlaksana dengan baik.

**“EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE TASKS OF THE
COOPERATIVE OFFICE, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES,
INDUSTRY AND TRADE OF PELALAWAN REGENCY IN INDUSTRIAL
DEVELOPMENT (STUDY OF BATIK INDUSTRY BONO)”**

ABSTRACT

Tio Ardiyansyah

Keywords: Evaluation, Development, Industry

The purpose of this study is to find out Evaluation Of The Implementation Of The Tasks Of The Cooperative Office, Small And Medium Enterprises, Industry And Trade Of Pelalawan Regency In Industrial Development (Study Of Batik Industry Bono). This research was conducted by looking at evaluating the implementation of tasks in the development of the batik bono industry from several points of view namely guidance, facilitation of facilities and infrastructure, and supervision. The hypothesis in this study is that it is suspected that the Evaluation of the Implementation of the Duties of the Cooperative Office, Small and Medium Enterprises, Industry and Trade of Pelalawan Regency in Industrial Development (study of the batik industry) has not been effective. The measurement technique used is the Likert Scale through the approach by giving scores to each size category. In its implementation, the researcher analyzes the data by using descriptive surveys in which the researcher describes the actual situation of what happened at the time of the research by collecting data, classifying and analyzing it so that an analysis of the problem can be obtained then a conclusion can be drawn. The population and sample in this study were all employees of the Industrial Development Section and all batik artisans of Batik Mainstay House using sex techniques. The type of data used is primary data obtained directly from respondents, namely the Head of Industrial Development Section and all Batik Craftsmen of Batik Mainstay Houses. While secondary data in the form of books, official government documentation obtained from the Industry Development Section and Mainstay Batik House. For data collection researchers used questionnaires, interviews, and observations. Based on the results of research that researchers have done regarding the Evaluation of the Implementation of the Duties of the Cooperative Office, Small and Medium Enterprises Industry and Trade of Pelalawan Regency in Industrial Development (Bono Batik Industry Study), it can be concluded that the implementation is in the range of 195 with the Less Implemented category. Which means it hasn't been done well yet.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi merupakan salah satu cabang ilmu sosial, administrasi juga sebagai salah satu fenomena atau ciri masyarakat modern, menurut Siagian (2003:2) administrasi sebagai kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya didalam organisasi, dan organisasi merupakan wadah dimana pemimpin melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Secara ringkas administrasi merupakan proses atau usaha kerjasama untuk mencapai tujuan. Tujuan inti administrasi adalah manajemen karena manajemen merupakan serangkaian kegiatan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi terutama pemimpin guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan administrasi hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya, dan mengukur efektifitas dari usaha-usaha mereka.

Salah satu usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka perlu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk dilaksanakan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan

merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini juga di tegaskan di dalam Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengatakan bahwa pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah.

Makna dari UU tersebut di atas menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam membangun ekonomi kerakyatan, Sejalan dengan itu, kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat.

Wajar rasanya apabila dikatakan bahwa Dinas Koperasi, Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan memiliki peran strategis dalam pembangunan Kabupaten Pelalawan, karena pemberdayaan Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (*pro poor*), selain itu Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (*pro growth*).

Keberadaan Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*) dan *pro environment*. Permasalahan bagi koperasi UKM Perindustrian

dan Perdagangan adalah pada kurang efektifnya pelaksanaan tugasnya khususnya pada pengembangan Industri, Salah satunya yaitu Dalam perkembangan industri kerajinan batik. Di Indonesia perkembangannya didominasi oleh usaha dalam skala kecil dan menengah. Berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) tahun 2015-2019 Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, industri kerajinan dan batik menghadapi beberapa permasalahan produksi dan pasar, yaitu produktifitas rendah, modal yang terbatas, manajemen belum banyak diterapkan, terbatasnya akses informasi pasar.

Berangkat dari alasan tersebut di atas, maka aspek lingkungan strategis dari semua aspek dalam skala nasional maupun internasional sangat berpengaruh dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.I Aspek Lingkungan Strategis

Aspek Lingkungan Strategis		
Aspek Politik	Aspek Ekonomi	Aspek Sosial
• Pesatnya kerjasama ekonomi antar negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC, akan menciptakan peluang baru bagi Koperasi dan UKM dan IKM.	• Kontribusi UKM dan IKM terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pelalawan • Pengembangan UKM dan IKM dalam penyerapan investasi • Kontribusi UKM dan IKM dalam ekspor non migas • Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)	• UKM dan IKM telah menjamin stabilitas pasar tenaga kerja • Penekanan pengangguran menjadi wahana bangkitnya wirausaha baru

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Pelalawan, 2019

Perencanaan Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan merupakan serangkaian kerangka teknis dan kerangka besar

sebagai *empowering* dalam pelaksanaan program kegiatan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan periode 2016-2021. Perencanaan Strategis ini sekaligus sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Pelalawan.

Visi Kementerian Perindustrian 2014-2019 adalah “Pemantapan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan”.

Adapun misinya ada 7, yaitu :

1. Mendorong peningkatan nilai tambah industri;
2. Mendorong peningkatan penguasaan pasar domestik dan internasional;
3. Mendorong peningkatan industri jasa pendukung;
4. Memfasilitasi penguasaan teknologi industri;
5. Memfasilitasi penguatan struktur industri;
6. Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa;
7. Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB.

Berdasarkan misi tersebut, ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Tingginya nilai tambah industri.
2. Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri.
3. Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri.
4. Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi Industri.
5. Kuat, lengkap, dan dalamnya struktur industri.
6. Tersebar nya pembangunan industri.

7. Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, ditetapkan program yang relevan dengan kebijakan Kabupaten Pelalawan, yaitu :**“Program Pengembangan Industri”**.

Program ini dijabarkan ke dalam berbagai rencana aksi, yaitu :

1. Pengemangan Industri Kecil dan Menengah (IKM);
2. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kreatif;
3. Penataan Struktur Industri;
4. Pengembangan Klaster Industri;
5. Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) terhadap Pemanfaatan Sumber Daya;
6. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra Kementerian Perindustrian di atas, maka Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Pelalawan membuat kebijakan serta program yang relevan dengan Kabupaten Pelalawan sehingga perlu memperoleh fokus di masa mendatang adalah :

1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), Penumbuhan dan Pengembangan industri kreatif. Program ini selaras dengan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Pelalawan. Inventarisasi terhadap industri yang telah bertumbuh merupakan langkah awal dalam pengembangan program ini. Selanjutnya disusun program pemberdayaan dan pengembangannya sehingga potensi kreatif masyarakat dapat

dioptimalkan dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus ekonomi daerah.

2. Pengembangan Klaster Industri, Fasilitas bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) terhadap Pemanfaatan Sumber Daya. Program ini perlu lebih memperoleh perhatian sebagai bagian penting dari upaya pengembangan potensi lokal sebagaimana diamanatkan oleh RPJMD. Meskipun program ini dilaksanakan oleh tingkat Kecamatan melalui program Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan, namun Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan juga perlu melakukan pembinaan kepada Kecamatan. Diharapkan akan muncul komoditas potensial yang akan jadi fokus pengembangan ke depan melalui program yang lebih komprehensif dan menjadikannya sebagai fondasi atau kompetensi inti ekonomi kecamatan.
3. Penataan Struktur Industri, Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. Peningkatan kemampuan teknologi dan penataan struktur industri sebagai program unggulan RPJMD perlu didukung oleh program Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan yang bertujuan untuk menciptakan industri terstruktur dan berbasis teknologi industri di bidang industri.

Diwujudkan dengan penetapan berbagai kebijakan untuk industri, salah satunya kerajinan batik, diantaranya melalui UU No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian bahwa pemerintah pusat dan daerah memfasilitasi dan mengembangkan kreatifitas dan inovasi masyarakat misalnya melakukan penyediaan ruang dan wilayah dalam berkreatifitas dan berinovasi, sentra industri,

pelatihan teknologi dan desain, perlindungan HaKI serta fasilitasi promosi dan pemasaran produk kreatif didalam dan luar negeri.

Dan berdasarkan RKT/RKA 2018 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan ada beberapa program, yang salah satunya yaitu Program Pengembangan Industri Kecil Menengah yang kegiatannya meliputi penumbuhan dan pengembangan industri dalam mendukung klaster industri pariwisata. Yang mana dalam kegiatan tersebut diuraikan dengan jelas bahwa sudah menjadi tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugasnya yaitu mengembangkan Industri tersebut. Dalam konteks pengembangan industri, dukungan kebijakan Industri Kecil dan Menengah, secara khusus juga dituangkan dalam Peraturan Bupati No. 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan memiliki tugas sebagai berikut :

1. Kepala

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas sesuai dengan kewenangannya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja, koordinasi, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan tugas dinas.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Subbagian Program
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Subbagian Keuangan

3. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan, kerjasama dan bantuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi di kabupaten Pelalawan.

Bidang Koperasi terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
- b. Seksi Fasilitas Pembiayaan Koperasi
- c. Seksi Penyuluhan, Pelatihan dan Pengawasan Koperasi

4. Bidang Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan Perumusan dan penjabaran kebijakan teknik, penyediaan dukungan, kerjasama dan bantuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kelembagaan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Pelalawan.

Bidang UMKM terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan dan Pembinaan UMKM
- b. Seksi Usaha dan Kemitraan UMKM
- c. Seksi Sarana Prasarana UMKM

5. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas merencanakan pembangunan industri, penerbitan perizinan, melengkapi data sistem informasi industri nasional.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Bidang Perindustrian mempunyai fungsi antara lain :

- 1) Penetapan dan penyusunan rencana pengembangan industri daerah.
- 2) Menyusun rencana dan program kerja bidang industri.
- 3) Penerbitan dan Pembinaan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Izin Usaha Industri (IUI) Menengah.
- 4) Penerbitan dan Pembinaan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Industri Kecil dan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Menengah.
- 5) Penerbitan dan Pembinaan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten.
- 6) Sistematis penyampaian pelaporan informasi industri.
- 7) Melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan industri.
- 8) Melakukan perumusan kebijakan pengembangan industri hilir hasil pertanian.
- 9) Melaksanakan monitoring, pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Menengah.
- 10) Memberikan rekomendasi permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pada Industri Kecil Menengah.
- 11) Melaksanakan pembinaan mutu/kualitas hasil produksi industri sesuai SNI, Barcode, Halal dan Tanggal Kadaluarsa (Expired date).
- 12) Pelaksanaan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 13) Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perindustrian terdiri dari:

- a. Seksi Industri Agro dan Kimia
- b. Seksi Pengembangan Usaha Industri

Seksi Pengembangan Usaha Industri mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Pengembangan Usaha Industri berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan usaha industri.
- 3) Melaksanakan pelatihan (Meningkatkan Kualitas Serta mengembangkan Karier Tenaga kerja), pembinaan (meningkatkan kinerja pengrajin) dan fasilitasi sarana prasarana industri (memberikan tempat untuk pengrajin batik).
- 4) Melaksanakan pendataan terhadap potensi pengembangan usaha industri.
- 5) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri.
- 6) Melaksanakan pengembangan sentra dan klaster usaha industri daerah.
- 7) Merumuskan dan melaksanakan pemberian rekomendasi izin usaha industri.
- 8) Melaksanakan konsultasi pembinaan dan pengembangan usaha industri.
- 9) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- 10) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 11) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pengembangan Usaha Industri.
- 12) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan bidang tugasnya.

- c. Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri

6. Bidang Perdagangan

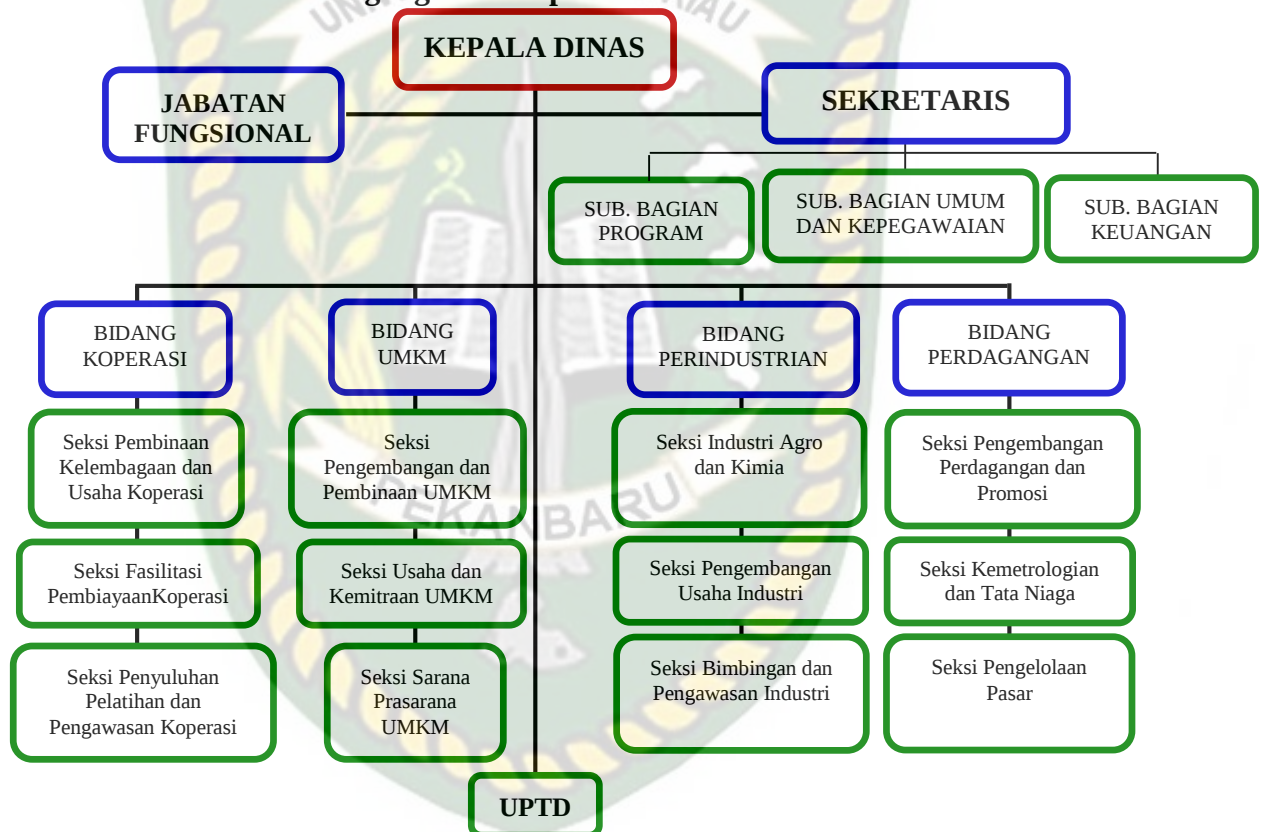
Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perizinan dan fasilitasi sarana distribusi perdagangan, melakukan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor dan pelaksanaan metrologi legal.

Bidang Perdagangan terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Perdagangan dan Promosi
- b. Seksi Kemetrolagian dan Tata Niaga
- c. Seksi Pengelolaan Pasar

Berikut bagan struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan :

Gambar I.I : Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan, 2019.

Dikabupaten Pelalawan sendiri jumlah Industri Kecil Menengah yaitu 814.

Ada beberapa macam industri yaitu Industri Makanan dan Minuman, Industri Pakaian dan Alas Kaki, Industri Barang dan Bahan Galian Bukan Logam, Industri

Barang dari Logam, Industri Alat Angkutan Lainnya, Furnitur, dan Industri Kerajinan. Dan Khusus untuk Industri Kerajinan berjumlah 172 Industri. Yang mana salah satunya yaitu Industri Batik Bono.

Yang melaksanakan tugas pengembangan industri batik Bono ialah Bidang Perindustrian dan khususnya adalah Seksi Pengembangan Usaha Industri. Setelah pelaksanaan tugas sudah dilakukan maka perlu dievaluasi. Istilah evaluasi mempunyai arti yaitu secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran, pemberian angka, dan penilaian kata-kata menyatakan analisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti spesifik evaluasi berkenaan produksi informasi mengenai nilai-nilai manfaat hasil kebijakan. (William N Dun 2003:608).

Dalam rangka pengembangan industri Batik Bono maka harus memberikan pelatihan kepada para pengrajin Batik Bono, lalu memfasilitasi industri Batik Bono, serta kerjasama kemitraan Industri Kecil dan Menengah dengan swasta. Dan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas dimana didalam RKA terdapat program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang di dalamnya telah diuraikan rincian kegiatan yang harus dilakukan Seksi Pengembangan Usaha Industri yaitu, memberikan pelatihan kepada Industri Batik Bono dan memfasilitasi Industri Batik Bono. Namun belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan adanya keterbatasan tenaga penyuluh dan kemampuan pro aktif pengusaha tersebut untuk berusaha meningkatkan dalam menjalankan usahanya. Kemudian belum adanya Balai Latihan Kerja.

Dengan melaksanakan pengembangan sentra dan klaster usaha industri daerah dan pengembangan usaha industri yang berperan penting dalam struktur

industri, dan menghasilkan barang yang layak dengan melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas.

Tugas pengembangan Industri sebagai salah satu solusi yang dapat dilaksanakan dalam membantu peningkatan Industri Kecil Menengah. Konsep pengembangan sebagai bagian dari paradigma pembangunan yang fokus perhatiannya kepada semua aspek seperti manusia dilingkungannya mulai dari aspek intelektual (sumberdaya manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial.

Dimulai dengan program pelatihan batik Bono tahun 2013. Usaha program pelatihan batik Bono didukung sekitar 60 pengrajin batik. Dimana setiap perajin batik harus menguasai teknik mencating, menggambar, mewarnai, serta memiliki kreatifitas. Dan dilakukan pendampingan dimulai dari pengenalan alat hingga teknik membatik.

Kerajinan batik memiliki keberagaman dan kekhasan coraknya yang biasanya melambangkan simbol-simbol budaya pada suatu daerah. Khusus nya batik Bono yang diambil dari fenomena alam yaitu Ombak Bono yang berada di Kecamatan Meranti, Kabupaten Pelalawan. Yang membuat Rumah Batik Andalan Terinspirasi untuk mengambil bentuk gelombang ombak Bono sebagai motif kain batik khas Kabupaten Pelalawan. Adapun motif batik lainnya yang ada di Rumah Batik Andalan yaitu motif lakum, motif timun suri, motif daun akasia, dan motif eukaliptus.

Usaha kelompok kerajinan batik atau industri kreatif kerajinan membatik di Kabupaten Pelalawan dilakukan dengan kelompok usaha, dimana terdapat 2 pusat

usaha kerajinan Batik Bono. Adapun kelompok usaha kerajinan batik yang berpusat di Kabupaten Pelalawan yaitu pada Kecamatan Pangkalan Kerinci adalah Kelompok usaha Rumah Batik Andalan (RBA) yang terletak di lingkungan pabrik RAPP tepatnya pada Balai Pelatihan Pengembangan Usaha Terpadu (BPPUT) Perumahan Townset 2 dan di Gang. 2000 dibelakang Pasarbaru.

Rumah Batik Andalan (RBA) ini merupakan program Community Development (CD) dari Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang terletak di Kecamatan Pangkalan Kerinci, anak perusahaan Indonesia dari pemimpin industri pulp dan kertas global Asia Pacific Resource International – yang dikenal sebagai April, mulai melakukan upaya untuk memberdayakan perempuan lokal dengan memberikan mereka keterampilan baru dan membantu mereka untuk mendapatkan uang mereka sendiri.

Dalam pelaksanaan pengembangan industri kreatif batik Bono di Kabupaten Pelalawan masih tidak berjalan dengan baik. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan hanya sekali melaksanakan tugasnya dalam pengembangan Industri Kreatif Batik Bono yang mana pada tahun 2015 dilaksanakannya pelatihan kepada para pengrajin batik Bono yang membawa pengrajin Batik Bono ke Yogyakarta untuk melihat teknik membatik secara langsung. Terlebih dari itu dalam hal fasilitasi bahkan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan usaha industri batik Bono pihak pemerintah belum melaksanakan usaha kemitraannya sebagai pelaksana pengembangan Industri Kecil Menengah. Jika dilihat padahal Batik merupakan suatu warisan budaya bangsa yang menciptakan banyak lapangan kerja apa bila industri ini dapat

dikembangkan dengan baik. Bahkan batik juga kekuatan dari suatu daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah. Sebab dari indsutri kreatif dapat menjadi penopang ekonomi daerah bahkan nasional. Berikut tabel jumlah pengrajin batik Bono:

Tabel I.II : Jumlah Pengrajin Batik Bono Rumah Batik Andalan tahun 2013-2019

Tahun	Jumlah Pengrajin (Orang)
2013	60
2014	30
2015	25
2016	20
2017	17
2018	11
2019	11

Sumber: Rumah Batik Andalan, 2019

Dari tabel I.II menunjukkan bahwa jumlah pengrajin batik di Rumah Batik Andalan (RBA) menurun setiap tahunnya, dimana pada tahun 2013 sebanyak 60 pengrajin batik lalu berkurang hingga menjadi 11 pengrajin batik pada 2019. Ini dikarenakan banyak waktu yang tersita, dimana semua pengrajin batik bono adalah Ibu rumah tangga sehingga para pengrajin sulit membagi waktu antara pekerjaan rumah dan pekerjaannya sebagai pembatik.

Adapun fenomena yang ditemukan peneliti terkait Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan (studi Industri Batik Bono) adalah sebagai berikut :

1. Pihak Dinas seharusnya melaksanakan pelatihan kepada Industri Kecil Menengah, tapi kenyataannya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Pelalawan hanya sekali

melaksanakan tugas pelatihannya kepada Industri Batik Bono, semenjak tahun 2013 hingga tahun 2019.

2. Pihak Dinas seharusnya melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana industri kepada industri Batik Bono, tapi pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan tidak memberikan fasilitasi kepada industri Batik Bono.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan maka penulis tertarik untuk meneliti sebuah judul penelitian yaitu : **“Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di atas dan untuk mempermudah pemahaman permasalahan yang akan di bahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka rumusan masalah yang di ajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono)?
2. Apa saja faktor penghambat Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam merelalisasikan program pengembangan Industri Batik Bono?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Industri (studi industri batik Bono).

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan atau dapat menjadi tambahan asupan ilmu tentang administrasi publik khususnya dibidang Pelaksanaan Tugas Pengembangan Industri. Serta menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi penulis mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Industri (studi industri batik Bono).

b. Kegunaan Teoritis

Sebagai sumbangan dan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Industri (studi industri batik Bono).

c. Kegunaan Untuk Dinas

Penelitian ini sebagai masukan untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan

mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil
Menengah dalam Pengembangan Industri (studi industri Batik Bono.



BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka perlu mengutip beberapa pendapat para ahli dan teori yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Hal ini dimaksud untuk dapat memberikan solusi yang erat kaitannya dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan, agar dapat memecahkan permasalahan yang akan menjadi landasan dalam penelitian terutama dalam menganalisis data, diantaranya :

1. Konsep Administrasi Publik

Sacara etimologi, administrasi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri dari 2 kata, yaitu “*ad*” dan “*ministrare*” yang berarti “*to serve*” yang berarti dalam bahasa Indonesia melayani atau memenuhi. Menurut Dimock & Dimock (dalam Deddy Mulyadi, 2016;30), administrasi berasal dari kata “*ad*” dan “*minister*” yang berarti juga “*to serve*”, jadi dapat dipahami bahwa yang dimaksud administrasi adalah suatu proses pelayanan dan pengaturan.

Harbani Pasolong (dalam Deddy Mulyadi, 2016;30) ada beberapa pengertian administrasi menurut para ahli antara lain:

1. Herbert A Simon (1993:3) mendefenisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.
2. Dwight Waldo (1971) mendefenisikan administrasi adalah suatu daya upaya yang kooperatif, yang mempunyai rasional tinggi.
3. Dimock & Dimock (1992:20) menyatakan bahwa administrasi adalah ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya.
4. S.P. Siagian (2004:2) mendefenisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu, mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

5. The Liang Gie (1993:9) adalah rangkaian terhadap pekerjaan yang dilakukan sekelompok orang didalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.
6. Harbani Pasolong administrasi adalah kegiatan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan pola bekerjasama untuk mencapai tujuan yang efektif, efesien, dan rasional.

Kemudian Zulkifli (2009;32) memandang administrasi sebagai suatu proses, aktivitasnya diawali oleh menetapkan suatu kebijakan, dan selanjutnya kebijakan tersebut dialkscanakan melalui proses kerjasama dari sekelompok orang untuk mencapai sasaran atau sejumlah tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dalam studi administrasi, tujuan yang dimaksud itu adalah tujuan ideal (teoritis) setiap organisasi, yaitu menciptakan efektifitas dan efesiensi dalam seluruh bidang kegiatan organisasi.

Adapun ruang lingkup administrasi menurut Harbani pasolong adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan publik
2. Birokrasi publik
3. Manajemen publik
4. Kepemimpinan
5. Pelayanan Publik
6. Adminitrasi kepegawaian negara
7. Kiinerja
8. Etika administrasi publik

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan umtuk memenuhi kebutuhan publik melalui pelayanan publik dengan membuat kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan melalui menejemen publik dan didasari birokrasi, kepemimpinan, etika dan kinerja yang baik.

Adminitrasi publik merupakan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efektif dam efisien. Adminitrasi publik

dimaksud untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap kebutuhan publik dan juga melambangkan praktik manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional menurut Pasolong (dalam Deddy Mulyadi, 2016;33)

Jhon M. Pfiffner dan Robert V Presthus (1960:4) menyatakan bahwa administrasi publik adalah:

1. Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik
2. Koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah
3. Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan dimaksud terhadap usaha sejumlah orang.

Nicholas Henry (dalam Deddy Mulyadi, 2016;34) mendefenisikan administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melambangkan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas dan efesiensi.

Ruang lingkup administrasi publik menurut Nicholas Henry yang dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas selain perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri, antara lain:

1. Organisasi publik, pada prinsipnya berkenaan dengan model-model dan perilaku birokrasi

2. Manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen sumber daya manusia
3. Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi dan administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.

T. Keban (dalam Deddy Mulyadi, 2016:34) Secara khusus kegiatan administrasi difokuskan pada aspek manajemen sebagai pelaksanaan dari kebijakan publik.

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano adalah Proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Menurut T. Keban (dalam Deddy Mulyadi 2016:34) administrasi publik harus dilihat setidaknya-tidaknya dari enam dimensi strategi sebagai berikut:

1. Dimensi kebijakan
2. Dimensi struktur organisasi
3. Dimensi manajemen
4. Dimensi etika
5. Dimensi lingkungan
6. Dimensi akuntabilitas kinerja

Dan menurut Prajudi (1986:175) administrasi publik berarti administrasi daripada organisasi yang bersifat publik, artinya kenegaraan atau antar kenegaraan, dan atau administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang sifat kenegaraan atau antar negara. Dapatdicermati dari uraian penjelasan administrasi publik bahwa prioritas utama administrasi terciptanya tingkat efektifitas dan efesiensi yang optimal, baik dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas utama dan aktivitas penunjang maupun dalam upaya pencapaian tujuan secara keseluruhan.

2. Konsep Organisasi

Untuk melaksanakan fungsi dan tugas administrasi publik, maka diperlukan suatu wadah/tempat yang dinamakan organisasi. Tanpa adanya organisasi maka tugas dan fungsi administrasi tidak dapat dijalankan. Dengan menjalankan tugas dan fungsi administrasi yang benar maka tujuan organisasi dapat dicapai dengan maksimal. Begitu juga sebaliknya apabila tugas dan fungsi administrasi tidak berjalan dengan baik maka tujuan organisasi sulit untuk dicapai bahkan tidak dapat tercapai.

Menurut James. D. Mooney (dalam Syafiie, 2010;51) organisasi adalah sebagai bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk pencapaian suatu tujuan bersama.

Lalu menurut John D. Millet (dalam Syafiie, 2010;51) organisasi sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama

Kemudian menurut Harbert A. Simon (dalam Syafiie, 2010;51) yang dimaksud dengan organisasi adalah sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan-hubungan lain didalam suatu orang-orang.

Defenisi organisasi ialah setiap bentuk perskutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan (Siagian 2008;6).

Menurut Dwight Waldo (dalam Syafiie, 2010;52) organisasi adalah struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasan dalam hubungan antara orang-orang pada suatu sistem administrasi.

Organisasi secara umum merupakan bentuk kerjasama antar individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Konsep organisasi menurut Luther Gulick (dalam Syafiie, 2010;52) ialah suatu alat saling berhubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan. Jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar.

Dari definisi-definisi tersebut Syafiie berkesimpulan bahwa organisasi merupakan, antara lain:

1. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi
2. Didalamnya terjadi berbagai hubungan antar-individu maupun kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluar
3. Terjadinya kerjasama dan pembagian tugas
4. Berlangsungnya proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing

Setiap organisasi juga harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai acuan dalam melaksanakan setiap fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab seperti yang dirumuskan oleh Atmosudirdjo (dalam Zulkifli, 2005;75) sebagai berikut :

1. Organisasi itu harus mempunyai tujuan
2. Harus ada pembagian kerja dan penugasan kerja yang homogen
3. Antara tugas, tanggung jawab, dan kekuasaan (wewenang) harus selalu terdapat kesesuaian.
4. Setiap pelimpahan kekuasaan dan tugas harus dilakukan setepat-tepatnya
5. Kesatuan komando dan hirarki
6. Komunikasi
7. Kewajiban pimpinan untuk mengadakan pengecekan terhadap pelaksanaan perintah-perintahnya

8. Kontinuitas
9. Saling asuh antara instansi lini dan staf
10. Koordinasi
11. Kehayatan
12. Tahu diri setiap warga organisasi

Siagian (2008:97) mengatakan yang dimaksud dengan organisasi yang baik adalah suatu organisasi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Terdapat tujuan yang jelas
2. Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap orang di dalam organisasi
3. Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orang dalam organisasi
4. Adanya kesatuan arah (*unity of direction*)
5. Adanya kesatuan perintah (*unity of command*)
6. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggungjawab seseorang.
7. Adanya pembagian tugas (*distribution of work*)
8. Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin
9. Pola dasar organisasi harus relative permanen
10. Adanya jaminan jabatan (*security of tenure*)
11. Imbalan yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan
12. Penempatan orang-orang yang sesuai dengan keahliannya (*the right man the right place*).

Organisasi yang terbesar dimana pun sudah barang tentu organisasi publik yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup negara. Oleh karena itu, organisasi publik mempunyai kewenangan yang absah (terlegitimasi) di bidang politik, administrasi, pemerintahan dan hukum serta terlembaga sehingga mempunyai kewajiban melindungi warganya, serta melayani kebutuhannya. Sebaliknya, berhak pula memungut pajak untuk pendanaan, dan menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan (Syafiie, 2010:53).

Jadi penulis menyimpulkan bahwa organisasi merupakan wadah/tempat perkumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama, memiliki struktur/kedudukan yang berbeda, serta adanya pembagian tugas yang jelas untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Dengan demikian terlihat jelas bahwa administrasi tidak dapat dipisahkan dari organisasi, karena tujuan organisasi dapat dicapai tergantung pada baik atau buruknya administrasi yang dijalankan didalam suatu organisasi.

3. Konsep Manajemen

Secara etimologi, di Indonesia *management* diterjemahkan sebagai manajemen, berasal dari kata *manus* (tangan) dan *agere*(melakukan), yang setelah digabung menjadi kata *managed* dalam bahasa inggris yang berarti mengurus atau *managiere* dari bahasa latin yang berarti melatih. Beberapa pendapat para pakar dapat dilihat sebagai berikut:

Menurut Frederick W Taylor (dalam Syafiie, 2010;48) ilmu manajemen dapat diterjemahkan sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri yang sebenarnya akan dikerjakan, selanjutnya mengkaji apakah sesuatu itu dikerjakan dengan cara terbaik serta termudah atau tidak.

Menurut Oliver Sheldon (dalam Syafiie, 2010;48) kegunaan manajemen adalah sebagai fungsi kajian industri dalam pelaksanaan kebijakan, dipandang dalam batas-batas kumpulan penyelenggaraan, dalam pekerjaan organisasi untuk tujuan khusus yang akan datang.

G. R. Terry mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumberdaya lainnya (dalam Syafiie, 2010;49).

Menurut Siagian (2008:5) pengertian manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam

rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut Harold Koontz dan Cryl O'Donnel (dalam Malayu S. P Hasibuan 2001:3) mengatakan bahwa manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian menejer melakukan koordinasi atas sejumlah aktifitas orang lain yang meliputi perencanaan pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian.

Sedangkan batasan manajemen menurut Waldo (dalam Zulkifli 2005:31) adalah analog keterkaitan antara organisasi, administrasi dan manajemen di abstraksikan organisasi diibaratkan sebagai psikologinya. Organisasi menunjukkan struktur dari pada administrasi dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain dalam suatu ikatan yang jalin menjalin.

Menurut Zulkifli (2005:83) fokus studi manajemen adalah menciptakan efektivitas dan efesiensi, sedangkan lokusnya adalah berbagai bentuk jenis organisasi. Kedua sama sama memandang manusia sebagai sumberdaya strategis setiap organisasi, oleh sebab itu penelaahan terhadap setiap fungsi manajemen umumnya tertuju kepada peranan sumberdaya manusia sebagai pengguna dan pengelola sumber daya lainnya yang dimiliki oleh organisasi. Sementara itu diketahui bahwa sumberdaya manusi itu apabila dikaji dari aspek karakteristik psikologis, latar belakang pendidikan, kemampuan dan bidang keahlian yang dimiliki sangat heterogen.

Hani Handoko (2003:6) berpendapat bahwa ada 3 alasan utama diperlukannya manajemen, yaitu terdiri dari :

1. Untuk mencapai tujuan, maksudnya manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi
2. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Maksudnya manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Maksudnya suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum adalah efisiensi dan efektivitas.

4. Konsep Evaluasi

Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran, sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terancang untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk mencantumkan nilai dari sesuatu.

Dari aspek pelaksanaan, Evaluasi adalah keseluruhan kegiatan pengumpulan data dan informasi, pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan. Evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk mengatur dan selanjutnya memulai sampai dimanakah tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan. Evaluasi adalah proses dimana memahami atau memberi arti mendapatkan dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi petunjuk pihak-pihak pengambil keputusan.

Menurut Santoso (2004:31) evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan serta

pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan. Evaluasi mempunyai kaitan yang erat dengan perencanaan yang secara utuh adalah salah satu fungsi dalam siklus manajemen apa saja yang direncanakan. Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberikan nilai secara objektif pencapaian hasil – hasil yang telah di rencanakan sebelumnya.

Menurut Siagian (2004;262) Evaluasi adalah proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil tugas yang nyata di capai dengan hasil-hasil yang sebelumnya di capai, evaluasi berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu beberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Jadi meskipun berkesan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan publik. Evaluasi pada “perumusan” dilakukan pada sisi post-tindakan, yaitu lebih pada “proses” perumusan dari pada muatan kebijakan yang biasanya “hanya” menilai apakah prosesnya sudah selesai dengan prosedur yang sudah disepakati.

Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan digunakan kriteria-kriteria umum yaang dimaksud untuk memberi arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang dirumuskan akan dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dalam melakukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.

Suchman (dalam Winarno, 2010;233) mengemukakan ada enam langkah dalam evaluasi kebijakan publik yaitu :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

Dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator variabel berdasarkan SOP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi tiga tipe sebagai berikut :

1. Pembinaan adalah suatu proses, hasil menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya peningkatan, perubahan dan kemajuan.
2. Sarana dan Prasarana sesuatu yang digunakan sebagai penunjang utama untuk terselenggaranya suatu proses seperti pembangunan dan usaha.
3. Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya

5. Konsep Pengembangan

Paradigma pengembangan organisasi berangkat dari konsep pertumbuhan manusia dan organisasi, proses kerja sama dan partisipasi serta semangat mencari menemukan dan menerapkan hal-hal baru.

Teori perubahan mengatakan bahwa tiga langkah diperlukan agar suatu perubahan mendatangkan hasil atau manfaat yang di harapkan. Pertama adalah disebut dengan pencarian, yaitu usaha untuk meninggalkan kebiasaan dan pandangan lama agar kebiasaan dan pandangan baru dapat di pelajari. Kedua adalah melakukan gerakan, yaitu melakukan perubahan. Dengan mengambil langkah ini berarti para anggota organisasi menguasai cara, metode dan suasana baru dan menerimanya sebagai hal yang memang di perlukan. Ketiga adalah melakukan

pembekuan kembali, dalam arti bahwa cara, metode, pandangan dan kondisi baru itu, karna telah di terima sebagai hal yang wajar dan memang di perlukan, terlaksana secara efektif dalam praktek.

Menurut siagian ketiga langkah tersebut di ambil melalui pengembangan organisasi, tegasnya, pengembangan organisasi dapat di artikan sebagai suatu proses perubahan yang mempunyai potensi untuk membawa berbagai bentuk peningkatan dalam kerjasama, kemampuan kerja sebagai tim dan produktifitas kerja.

Pengembangan organisasi yang direncanakan secara matang dan dilaksanakan secara baik berusaha untuk merubah sikap, nilai, struktur dan kebiasaan sedemikian rupa sehingga organisasi mampu menyesuaikan diri pada tuntutan perubahan, baik yang di prakarsai secara internal oleh manajemen maupun yang terjadi sebagai tanggapan organisasi terhadap tuntutan lingkungan yang bergerak dinamika.

Pengembangan organisasi merupakan program penting untuk dilaksanakan. Mengingat pentingnya upaya tersebut perlu di pahami kriteria keberhasilannya. Kriteria tersebut bertitik tolak dari dan bermuara padapengakuan dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia.

Dengan titik tolak pemikiran demikian suatu program pengembangan organisasi dapat di artikan berhasil apabila :

1. Pada tingkat individual terdapat peningkatan produktifitas kerja kemampuan melakukan berbagai penyesuaian yang di perlukan, tumbuh

dan terpeliharanya sikap dan perilaku yang positif, kesediaan menerima cara, metode, teknik, kerja yang baru.

2. Pada tingkat kelompok terjadi interaksi positif antara para anggota suatu kelompok kerja, terdapat koordinasi yang mantap, berkembangnya kemampuan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul.
3. Pada tingkat organisasi terdapat kemampuan bergerak sebagai suatu kesatuan yang baru, tanggapan terhadap perubahan, baik karena dorongan internal maupun eksternal, tumbuhnya orientasi manusia yang tepat, terjadinya peningkatan kemampuan, mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Karena itu pengembangan organisasi menurut siagian harus dilihat berbagai suatu proses yang berlangsung terus menerus berdasarkan rencana yang matang, pelaksanaan yang cermat, pengendalian yang rasional.

Agar pengembangan organisasi terwujud, perlu diambil berbagai langkah dalam menerapkan suatu pengembangan organisasi. Berbagai langkah tersebut dikenal dengan istilah proses pengembangan organisasi. Dalam melaksanakan suatu program pengembangan organisasi bukanlah hal yang mudah, memerlukan waktu yang cukup panjang serta biaya yang tidak sedikit. Karena itu dukungan penuh manajemen puncak untuk pelaksanaan program tersebut merupakan keharusan mutlak.

Demikian menurut siagian langkah-langkah yang biasanya diambil dalam melaksanakan suatu program pengembangan organisasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan diagnosa
2. Pengumpulan data
3. Umpan balik dan tindak lanjut
4. Penyusunan rencana pemecahan masalah
5. Pembinaan tim
6. Kerja sama antar kelompok
7. Penilaian hasil yang dicapai

Teknik-teknik pengembangan organisasi memungkinkan organisasi meningkatkan efektifitas dan kemampuan beradaptasi dengan kondisi dan tuntutan lingkungan yang berubah. Demikian dalam buku siagian pengembangan organisasi di katakana sebagai instrument ilmiah dalam meningkatkan efektifitas dan kesehatan organisasi karena pengembangan organisasi mengandung unsure-unsur :

1. Terencana
2. Mencakup seluruh organisasi
3. Berdampak jangka panjang
4. Melibatkan manajemen puncak
5. Menggunakan berbagai bentuk interfensi berdasarkan pendekatan berperilaku

Sehingga indikator dari pengembangan menurut siagian berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian.

1. Perencanaan

Menurut terry perencanaan merupakan suatu yang sangat di perlukan dan merupakan lengan intelektual dari perkembangan hari depan kita, juga dikatakan bahwa perencanaan merupakan dasar dari fungsi-fungsi manajemen lainnya.

Defenisi dari perencanaan, perencanaan merupakan pemilihan dan menghubungkan fakta,menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang di usulkan dan memang di perlukan untuk mencapai hasil yang di inginkan. Seseorang peencana harus mampu untuk menggambarkan (visualisasi) pola kegiatan yang diusulkan itu secara jelas dan gambling. Planning sesungguhnya merupakan suatu proses intelektual. Dengan planning, para manager berusaha untuk melihat kedepan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan, menyiapkan alat-alat darurat, menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas untuk mencapai sasaran.

2. Pelaksanaan

Menurut Syafiie (2010:78) pelaksanaan sudah barang tentu yang paling penting dalam fungsi manajemen. Dalam kamus umum bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita. Mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan. Pelaksana adalah orang yang mengajarkan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan. Berdasarkan batasan di kemukakan oleh Poerwadarmita maka dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Jadi dengan demikian pengertian tersebut di atas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal kata laksana.

Sedangkan pelaksanaan menurut The Ling Gie pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dijadikan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, di mana pelaksanaannya, kapan waktunya di mulai dan berakhir, dan bagaimana cara di laksanakan. (The Ling Gie).

Kemudian menurut Syafiie (2010:78) pelaksanaan adalah pengupayaan berbagai jenis tindakan agar semua anggota kelompok mulai dari tingkat teratas sampai terbawah berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Lalu menurut Sukwaty, dkk. (dalam Abd. Rohman 2018:37) pelaksanaan adalah penerapan atau implementasi dari rencana yang telah ditentukan.

Menurut Abd. Rohman (2018:37) pelaksanaan adalah langkah penerapan rencana dalam kondisi nyata yang melibatkan segenap sumber daya manusia yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut santoso Sastropetro. (2002;183). Mengemukakan bahwa pelaksanaan di artikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang di lakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataanya.

Menurut Sondang P. Siagian. (2003;120). Menyatakan bahwa jika suatu rencana terealisasi telah tersusun dan njika program kerja yang “*achievement oriented*” telah di rumuskan maka kini tinggal pelaksanaanya. Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu di perhatikan yaitu:

1. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisi sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu.
2. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber.
3. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis, dalam hal ini di perlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang di capai.
4. Review artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan dan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan di harapkan adanya saran dan perbaikan bila di temui adanya perbedaan penyimpangan

Faktor pelaksanaan meliputi posisi paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu program untuk di wujudkan. Maka dalam proses kegiatannya menurut Bintoro. (2000;199). Perlu memperhatikan beberapa hal yaitu:

1. Perlu di tentukan secara jelas siapa atau badan lembaga mana secara fungsional akan di serahi wewenang mengkoordinasi program di dalam suatu sektor.

2. Perlu di perhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik. Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsional perlu di tuangkan kedalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan di taati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut.
3. Perlu di kembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu paniti akerja sama dengan tanggung jawab dan koordinasi yang jelas.
4. Perlu di usaha kan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaan.

Menurut Westra, dkk (dalam Adisasmita, 2011:24) mengemukakan pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Untuk mencapai suatu tujuan maka diperlukan upaya atau usaha oleh setiap anggota organisasi terhadap rangkaian kegiatan untuk semua rencana dan kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan. Dengan semua rencana yang telah dirumuskan maka diperlukan alat-alat pendukung dalam pelaksanaan suatu rencana tersebut.

Dari pemaparaan yang di kemukakan tadi dapat di katakana bahwa pelaksanaan itu adalah suatu kegiatan dalam proses merealisasikan rencana yang telah di tetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan pelaksana dan suatu kelompok sasaran. Dengan demikian, pelaksanaan sebagai suatu kegiatan untuk merealisasikan tujuan terhadap sebuah sasaran sehingga suatu pelaksanaan akan mengarah kepada usaha yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

3. Pengendalian

Menurut Terry (2009:166) untuk mencapai hasil yang diinginkan atau yang direncanakan, keberhasilan, atau kegagalan dinilai dari sasaran-sasaran yang diinginkan.

Pengendalian ialah suatu usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Pengendalian berorientasi pada objek yang dituju dan merupakan alat untuk menyuruh orang bekerja menuju sasaran yang diinginkan.

Pengendalian merupakan suatu proses dasar untuk mendapatkan suatu yang identik dan apa saja yang dikendalikan. Kegiatan yang sulit sekali diukur karena alat pengukurnya tidak ada. Bagi kondisi tersebut dapat memakai ukuran yang agak kasar. Misalnya untuk mengukur sikap pekerja-pekerja apabila harapan-harapan ingin dicapai itu terlampaui luas maka standar-standar ukuran biasanya terdiri dari sasaran-sasaran terdiri secara umum.

6. Agen Pemberdayaan

Menurut Chamber individu yang diberdayakan adalah orang yang tidak berdaya yang sering kali tidak memiliki daya untuk berjuang karena sudah dilumpuhkan (dalam Oos M. Anwas, 2013:54)

Oleh karena itu dalam pemberdayaan dibutuhkan peran orang luar. Orang asing yang bertugas memberdayakan ini adalah petugas pembangunan baik formal maupun nonformal. Petugas formal adalah aparatur pemerintah yang bertugas dilapangan, seperti : Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan, Seksi Pengembangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Pelalawan, Seksi Bimbingan dan Pengawasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan. Petugas non formal adalah individu atau kelompok yang memiliki dedikasi secara sukarela untuk membantu pemberdayaan masyarakat baik yang dikelola oleh suatu Lembaga atau secara individu. Petugas non formal tersebut diantaranya : PT. RAPP dalam bentuk program *Comunity Development*(CD)nya.

Tugas pelaku pemberdayaan adalah mendorong dan menciptakan individu serta masyarakat untuk mampu melakukan perubahan perilaku menuju kearah kemandirian (berdaya). Perubahan perilaku ini baik aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraannya. Oleh karena itu petugas yang memberdayakan individu dan masyarakat baik formal maupun non formal dapat disebut sebagai Agen Pemberdayaan.

7. Industri Kecil dan Menengah

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dijelaskan industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya. Sedangkan pengertian industri yang dikaitkan dengan proses pengolahan dan pengembangan industri yang digunakan sebagai dasar acuan dari pada Departemen Perindustrian, yaitu : industri adalah rangkaian kegiatan dan ekonomi yang meliputi pengolahan, pengerjaan, pengubahan, perbaikan bahan baku atau barang setengah jadi menjadi barang yang berguna dan lebih bermanfaat untuk pemakaian dan usaha jasa yang menunjang kegiatan diatas.

Menurut Biro Pusat Statistik (1993 :53) industri kecil adalah sebuah industri yang mempunyai tenaga kerja 5 (lima) sampai dengan 19 (sembilan belas) orang tenaga yang terdiri dari pekerja kasar yang dibayar, pekerja pemilik dan pekerja keluarga yang tidak dibayar. Dengan demikian dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan industri, sub sektor industri kecil dan kerajinan rakyat diharapkan mempunyai peran strategis, yaitu sebagai penggerak utama peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pembaharuan tata nilai masyarakat.

Dalam perkembangannya industri kecil membawa misi pemerataan yaitu dengan penyebaran kegiatan usaha, peningkatan partisipasi bagi golongan ekonomi lemah, perluasan kesempatan kerja dan dengan pemanfaatan potensi ekonomi terbatas. Dalam rangka menunjang pembangunan daerah, maka pengembangan industri kecil disebar luaskan ke seluruh wilayah melalui penetapan pusat pertumbuhan industri kecil, sentra industri, lingkungan industri, Pembinaan Industri Kecil dan Menengah. Pada Dinas fungsi dari pusat-pusat pertumbuhan industri menurut Syahrudin (1989:45) adalah :

1. Sebagai pusat pembinaan dan penyuluhan termasuk bantuan bahan baku dan pemasaran;
2. Sebagai tempat pelengkap peralatan yang tidak dipergunakan bersama untuk suatu wilayah guna menyempurnakan produk;
3. Sebagai sarana kerja untuk sejumlah pengusaha industri kecil.

Dengan adanya pusat-pusat pertumbuhan industri ini diharapkan hasil produksi dapat lebih meningkat yang disertai dengan peningkatan mutu produksi sehingga menjadi suatu hasil produksi dengan daya jual yang tinggi. Dari uraian tersebut di atas maka dapat diperoleh gambaran bahwa industri kecil mempunyai

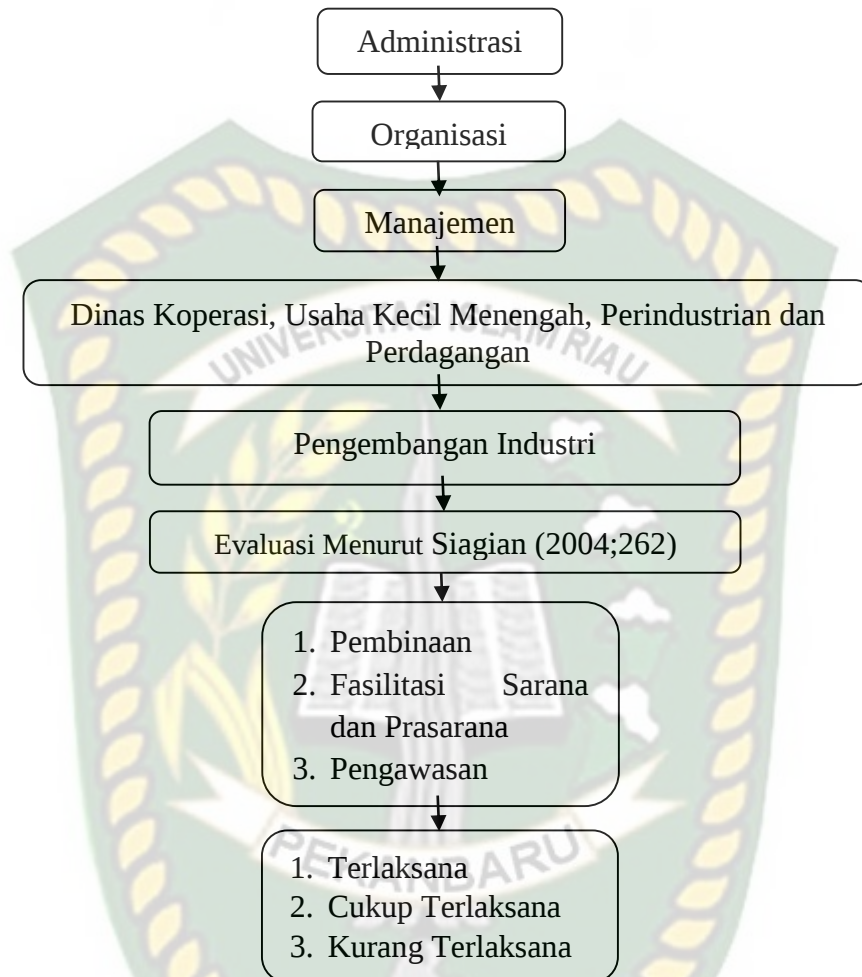
investasi modal yang relative kecil, sedangkan penggunaan teknologi yang masih sederhana.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan kerangka pikir berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting yakni sebuah pemahaman dimana yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya atau sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan serta menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti.

Adapun yang menjadi kerangka pikir dari judul Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Peindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono) secara rinci dapat dilihat pada bagan sebagai berikut.

Gambar II.I Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono).



Sumber : Modifikasi Penulis,2019.

C. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2007:377) bahwa hipotesis adalah sebagai dugaan sementara atas jawaban sementara mengenai suatu masalah yang masih perlu diuji secara empiris untuk mengetahui apakah pernyataan atau dugaan jawaban itu dapat diterima atau tidak.

Berdasarkan kerangka berfikir diatas maka dapat ditemukan hipotesis sebagai berikut : *“Diduga Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Dalam Penembangan Industri (studi industri batik bono) belum efektif”*

D. Konsep Operasional

Dengan konsep ini peneliti akan memberikan penafsiran yang mengaitkan pemikiran dalam analisa. Peneliti melaksanakan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini, sesuai dengan kerangka teoritis yang telah dikemukakan sebelumnya oleh peneliti, Adapun konsep operasional tersebut antara lain :

1. Administrasi adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, secara efektif dan efesien.
2. Organisasi adalah sebagai tempat atau wadah dimana sekelompok orang berkumpul untuk melaksanakan suatu kegiatan dan tujuan
3. Manajemen adalah ilmu dan seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
4. Pengembangan adalah disiplin ilmiah yang berkaitan dengan masalah-masalah perilaku organisasi yang memungkinkan organisasi untuk dapat meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi.

5. Evaluasi adalah proses pengumpulan informasi mengenai objek evaluasi dan menilai objek evaluasi dengan membandingkannya dengan standar evaluasi.
6. Tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan pada keberhasilan kerja dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada.
7. Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Dinas disini adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan yang melaksanakan tugas pembinaan Industri Batik Bono.
8. Industri Kecil Menengah adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi daya gunanya.
9. Batik Bono adalah terinspirasi dari gelombang “Bono” yang merupakan salah satu bentuk fenomena alam yang luar biasa terjadi sekali setahun yang berada di Kecamatan Teluk Meranti di Kabupaten pelalawan yang di lestarikan melalui bentuk batik,kemudian disebut dengan ”Batik Bono”.
10. Pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan kinerja menjadi lebih baik lagi. Dalam penelitian ini suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.
11. Fasilitas Sarana merupakan segala sesuatu yang bisa dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan dan Prasarana merupakan segala sesuatu yang digunakan sebagai penunjang utama untuk terselenggaranya

suatu proses seperti pembangunan. Maka Sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai perbekalan.

12. Pengawasan merupakan upaya pemantauan secara terus menerus untuk memahami bidang-bidang tertentudari perencanaan yang sedang di jalankan.

E. Operasional Variabel Penelitian

Tabel II.I Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono).

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Evaluasi adalah Proses Pengukuran dan Perbandingan hasil-hasil Tugas yang nyata di capai dengan hasil-hasil yang sebelumnya di capai (siagian 2004;262)	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono).	1. Pembinaan	1. Analisis permasalahan IKM 2. Penentuan solusi 3. Perbaikan	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana

1	2	3	4	5
		2. Fasilitas Sarana dan Prasarana	1. SIKIM (sentra industri kecil menengah) 2. Bantuan perlengkapan batik 3. Bantuan peralatan batik	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
		3. Pengawasan	1. Melakukan kunjungan 2. Membandingkan serta menilai rencana, waktu dan hasil kegiatan IKM 3. Pemantauan prestasi RBA	Terlaksana Cukup terlaksana Tidak terlaksana

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019.

F. Teknik Pengukuran

Dalam penelitian ini untuk pengukuran dari masing-masing indikator dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pengembangan industri Batik Bono Kabupaten Pelalawan diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu terlaksana, cukup terlaksana, kurang terlaksana. dan sedangkan untuk pengukurannya menggunakan teknik pengukuran *Skala Linkert*, yang menurut Sugiyono (2016;168) adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi sekelompok orang tentang fenomena-fenomena sosial yang terjadi dilokasi penelitian. Skala Linkert yaitu dengan memberikan nilai skor pada setiap kategori yang menjadi alternatif jawaban terlaksana diberi nilai skor 3, cukup terlaksana skor 2, dan kurang terlaksana skor 1.

Dari sejumlah item pertanyaan yang diajukan kemudian dicari interval, untuk menentukan interval kriteria penilaian dengan cara nilai skor tertinggi dikurangi nilai skor terendah setelah itu dibagi dengan jumlah kategori ukuran, selanjutnya hasil pembagian dikurangi 1, rumusnya sebagai berikut :

1. Pengukuran Variabel

$$\text{Interval} = \frac{\text{Total Skor Nilai Tertinggi} - \text{Total Skor Terendah} - 1}{\text{Jumlah Kategori}}$$

Dimana :

Total Skor Tertinggi = Nilai Kategori Tertinggi x Jumlah Pertanyaan x Jumlah Responden

Total Skor Terendah = Nilai Kategori Terendah x Jumlah Pertanyaan x Jumlah Responden

Total Skor Tertinggi = $3 \times 9 \times 15 = 405$

Total Skor Terendah = $1 \times 9 \times 15 = 135$

$$\text{Interval} = \frac{405 - 135 - 1}{3} = 90$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, adapun pengukuran terhadap Variabel dari Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pengembangan Industri Batik Bono Kabupaten Pelalawan dengan responden 15 orang dan 9 pertanyaan yaitu diperoleh untuk responden dengan skor tertinggi 405 dan untuk skor terendah 135 dengan jarak interval 90. Dengan demikian penilaian terhadap variabel dapat dinyatakan sebagai berikut :

Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuisioner mengenai indikator evaluasi

pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam pengembangan Industri Batik Bono berada pada interval nilai skor 405-315.

Cukup Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuisioner mengenai indikator evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam pengembangan Industri Batik Bono berada pada interval nilai skor 314-224.

Kurang Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuisioner mengenai indikator evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam pengembangan Industri Batik Bono berada pada interval nilai skor 223-133.

2. Pengukuran Indikator

$$\text{Interval} = \frac{\text{Total Skor Nilai Tertinggi} - \text{Total Skor Terendah} - 1}{\text{Jumlah Kategori}}$$

Dimana :

Total Skor Tertinggi = Nilai Kategori Tertinggi x Jumlah Pertanyaan x Jumlah Responden

Total Skor Terendah = Nilai Kategori Terendah x Jumlah Pertanyaan x Jumlah Responden

Total Skor Tertinggi = $3 \times 3 \times 15 = 135$

Total Skor Terendah = $1 \times 3 \times 15 = 45$

$$\text{Interval} = \frac{135 - 45 - 1}{3} = 30$$

Untuk mengetahui masing-masing penilaian atas variabel tentang evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam pengembangan Industri Batik Bono yang terdiri dari 3 indikator dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pembinaan, diajukan 3 pertanyaan dengan 15 responden dengan skor evaluasi pelaksanaan tugas dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan dalam pengembangan industri batik bono tertinggi 135 dan skor terendah 45 dengan interval skor 30 kemudian dinyatakan :

Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuisioner mengenai indikator evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam pengembangan Industri Batik Bono berada pada interval nilai skor 135-105.

Cukup Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuisioner mengenai indikator evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam

pengembangan Industri Batik Bono berada pada interval nilai skor 104-74.

Kurang Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuisisioner mengenai indikator evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam pengembangan Industri Batik Bono berada pada interval nilai skor 73-43.

2. Fasilitas Sarana dan Prasarana, diajukan 3 pertanyaan dengan 15 responden dengan skor evaluasi pelaksanaan tugas dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan dalam pengembangan industri batik bono tertinggi 135 dan skor terendah 45 dengan interval skor 30 kemudian dinyatakan :

Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuisisioner mengenai indikator evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam pengembangan Industri Batik Bono berada pada interval nilai skor 135-105.

Cukup Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuisisioner mengenai indikator evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam

pengembangan Industri Batik Bono berada pada interval nilai skor 104-74.

Kurang Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuisisioner mengenai indikator evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam pengembangan Industri Batik Bono berada pada interval nilai skor 73-43.

3. Pengawasan, diajukan 3 pertanyaan dengan 15 responden dengan skor evaluasi pelaksanaan tugas dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan dalam pengembangan industri batik bono tertinggi 135 dan skor terendah 45 dengan interval skor 30 kemudian dinyatakan :

Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuisisioner mengenai indikator evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam pengembangan Industri Batik Bono berada pada interval nilai skor 135-105.

Cukup Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuisisioner mengenai indikator evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam

pengembangan Industri Batik Bono berada pada interval nilai skor 104-74.

Kurang Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuisisioner mengenai indikator evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam pengembangan Industri Batik Bono berada pada interval nilai skor 73-43.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah survey deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi pada saat penelitian dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh perumusan analisa terhadap masalah yang dihadapi kemudian dapat diambil suatu kesimpulan. Kemudian untuk metode penelitian ini digunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini tentang hubungan variabel untuk menguji hipotesis tentang variabel dari sampel yang diambil dari populasi tertentu (Sugiyono 2013:81).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dan Rumah Batik Andalan sebagai lokasi penelitian. Adapun yang menjadi pertimbangan penulis dalam penentuan lokasi penelitian yakni yang melakukan pengembangan terhadap Industri Kecil Menengah ialah Dinas terkait pembinaan dilakukan agar konsistensi dari salah satu bentuk kebudayaan Pelalawan tetap terjaga, selain itu berdasarkan fenomena yang ada, penulis melihat dan mengamati bahwasannya masih ditemukannya gejala-gejala yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembinaan Industri Keci Menengah pada industri batik Bono.

C. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kuantitatif, jika dirancang sebagai sebuah penelitian survei keberadaan populasi dan sampel nyaris tak dapat dihindarkan. Populasi dan sampel merupakan sumber utama untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam mengungkapkan fenomena atau realitas yang dijadikan fokus penelitian. Demi mencapai keakuratan validitas data yang dihasilkan populasi dan sampel yang dijadikan objek penelitian harus memiliki kejelasan baik dari segi ukuran maupun karakteristiknya. Apabila seseorang ingin melakukan penelitian semua elemen adalah wilayah penelitian, maka penelitian merupakan penelitian populasi. Populasi adalah subjek suatu penelitian yang memiliki karakteristik yang homogen. Dalam arti lain adalah sekelompok orang atau perkumpulan orang yang mempunyai karakteristik persamaan dalam sebuah organisasi, dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan bidang perindustrian.

Sampel itu sendiri adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat menggambarkan populasinya. Adapun yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Kepala Diskoperindag, Kepala Bidang Perindustrian, Seksi Pengembangan Usaha Industri serta pengrajin batik Bono yang berada di Rumah Batik Andalan.

Untuk lebih jelasnya tentang populasi dan sampel penelitian ini dapat dilihat pada tabel III.I dan tabel III.II berikut ini :

Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Tentang Pelaksanaan Tugas Pengembangan Industri Batik Bono.

No	Unit Sampel	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas	1	1 orang	100 %
2	Kepala Bidang Perindustrian	1	1 orang	100 %
3	Kepala Seksi Pengembangan Usaha Industri	1	1 orang	100%
5	Ketua Rumah Batik Andalan	1	1 orang	100%
Jumlah		4	4 orang	100 %

Sumber: Olahan Penelitian, 2019.

Tabel III.II : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Tentang Pelaksanaan Tugas Pengembangan Industri Batik Bono.

No	Unit Sampel	Populasi	Sampel	Persentase
1	Seksi Pengembangan Usaha Industri	5	5 orang	100 %
2	Pengerajin Batik Bono RBA	10	10 orang	100%
Jumlah		15	15 orang	100 %

Sumber: Olahan Penelitian, 2019.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini untuk bidang Perindustrian yakni menggunakan teknik sensus. Teknik sensus adalah seluruh populasi dijadikan sampel dengan alasan jumlah populasi relatif kecil dan dapat dijangkau serta mengetahui tentang pelaksanaan tugas pembinaan Industri Kecil Menengah .

Dan untuk pengrajin batik Bono menggunakan teknik sensus, teknik sensus adalah teknik penarikan sampel yang semua anggota populasi digunakan sebagai sampel dikarenakan populasi relatif kecil.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. *Data primer* adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penelitian lapangan tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono). Dalam penelitian ini data diperoleh dari wawancara sebanyak 4 responden yang terdiri dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan, Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan, Kepala Seksi Pengembangan Usaha Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dan Ketua pengrajin Batik Bono di Rumah Batik Andalan (RBA), dan untuk penyebaran kuisioner sebanyak 15 responden yang terdiri dari Seksi Pengembangan Usaha Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan, serta pengrajin Batik Bono di Rumah Batik Andalan (RBA).
2. *Data sekunder* adalah data dari pihak kedua berupa keterangan-keterangan yang relevan dapat menunjang objek penelitian ini meliputi buku-buku kepustakaan, arsip-arsip, serta peraturan yang menyangkut dengan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono). Sumber data yang penulis peroleh dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan Rumah Batik Andalan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung yakni metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan pengamatan langsung tentang perubahan fenomena-fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut, bagi pelaksana observasi untuk melihat objek moment tertentu, sehingga mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara yakni proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dan penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

Data yang digunakan dalam teknik wawancara ini meliputi: nama, umur, tingkat pendidikan, dan jabatan dalam pelaksanaan tugas pembinaan industri batik Bono Kabupaten Pelalawan. Teknik ini dimaksud agar peneliti

mampu mengeksplorasi data responden yang bersifat nilai, makna, dan pemahaman. Wawancara yang dimaksud adalah wawancara penulis kepada Kepala Bidang Perindustrian Kabupaten Pelalawan dan kepada Ketua Pengrajin Batik Bono.

3. Kuisioner

Kuisioner adalah pengumpulan data dengan menyebarkan suatu daftar pertanyaan yang telah ditentukan kategori jawabannya dan menyebarkan kepada responden untuk diisi sesuai dengan jawaban yang telah disediakan. Responden tersebut 19 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan, Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan, Seksi Pengembang Usaha Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan, serta pengrajin Batik Bono di Rumah Batik Andalan (RBA).

4. Dokumentasi

Merupakan bukti fisik dari penelitian ini, berupa foto-foto penelitian dan surat-surat/dokumen-dokumen yang telah diperoleh selama penulis melakukan penelitian. Dokumentasi ini juga dilakukan sebagai bukti dari hasil observasi yang penulis lakukan.

G. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber sehingga proses ini diartikan sebagai proses dimana adanya upaya

mengolah suatu data menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dengan tujuan mendeskripsikan data, membuat induksi maupun penarikan kesimpulan tentang karakteristik populasi. Sesuai dengan tujuan yang dikemukakan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif secara deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan berdasarkan kondisi yang ada di lapangan. Selanjutnya data yang didapat dikumpulkan dan di klasifikasikan melalui kuisioner menurut jenisnya kemudian diolah kedalam tabel setelah itu diuraikan dan kemudian diberikan pembahasan yang mudah untuk dipahami.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan

Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Maksud dari Penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan, tahun 2016 – 2021 yaitu:

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016-2021 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua aparatur dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang perencanaan bidang koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurung waktu 2016 - 2021 dapat tercapai.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam upaya

meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta pengembangan Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Pelalawan.

RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah terpilih.

Yang menjadi visi Kabupaten Pelalawan adalah **“INOVASI MENUJU PELALAWAN EMAS (EKONOMI MANDIRI, AMAN DAN SEJAHTERA)”**.

Misi Kabupaten Pelalawan adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya Melayu;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
3. Meningkatkan Penguatan Sistem inovasi untuk mendukung Perekonomian Daerah yang Kuat dan Berdaya Saing Tinggi;
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur ;
5. Meningkatkan Kinerja Birokasi dan Otonomi Desa;
6. Meningkatkan Investasi dan Pengelolaan Sumber Daya Unggulan Daerah Berbasis Kerakyatan dan Partisipasi Masyarakat yang berkelanjutan;
7. Meciptakan Ketertiban dan Keamanan.

Dari 7 misi Kabupaten Pelalawan tersebut, terdapat 2 (dua) misi yang secara umum berkaitan dengan pelayanan publik dalam pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pelalawan, dan 1 (satu) misi yang langsung berkaitan dengan teknis tugas dan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan.

Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi untuk mendukung Perekonomian Daerah yang Kuat dan Berdaya Saing Tinggi.

Meningkatkan pelayanan terkait peningkatan modal usaha serta menciptakan wirausaha baru sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan dan dapat menekan pengangguran serta menciptakan lapangan kerja.

2. Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Otonomi Desa.

Meciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, transparan dan taat kepada hukum.

Dengan adanya visi, misi dan program kerja Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pelalawan serta adanya keputusan dari Menpan tentang adanya nilai nilai dan data yang dikelompokkan oleh Menpan maka pada tahun 2016 resmi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pelalawan melebur menjadi satu dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Menjadi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan.

A. Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan

Sebagai Perangkat Daerah bertipe A dengan beban kerja yang besar, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan didukung dengan 51 (lima puluh satu) orang sumber daya Aparatur Sipil Negara. Dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan

mempekerjakan 19 (sembilan belas) orang Tenaga Harian Lepas yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang tenaga administrasi, 13 (tiga belas) orang petugas kebersihan dan 10 (sepuluh) orang petugas keamanan, 3 (tiga) Tenaga Penyuluh Lapangan.

Secara keseluruhan, sumber daya manusia dalam menunjang kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan berjumlah 108 (seratus delapan) orang. Adapun komposisi sumber daya manusia Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel IV.I berikut:

Tabel IV.I: Komposisi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016.

NO.	SUMBER DAYA MANUSIA	JUMLAH (Orang)	%
1	ASN DISKOPUKMPERINDAG	51	47,22
2	PEGAWAI TIDAK TETAP	57	52,78
Jumlah		108	100,00

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindagsar Kabupaten Pelalawan, 2019.

Dilihat dari pengelompokan Aparatur Sipil Negara berdasarkan golongan, sebagaimana ditunjukkan Tabel IV.II pada tahun 2016 sebagian besar berada pada Golongan III dengan rasio mencapai 61% (31 orang), dan diikuti oleh Golongan IV 13,72% (7 orang). Selebihnya berada pada Golongan II 25% (13 orang).

Tabel IV.II : Kondisi Existing Sumber Daya ASN Dinas Koperasi, Usaha Koperasi dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Golongan Tahun 2016.

NO.	PENUGASAN	GOLONGAN							
		I	%	II	%	III	%	IV	%
1	ASN DISKOPUKMPERIND AG	0	0,00	13	25,00	31	61,00	7	13,72
2	PEGAWAI TIDAK TETAP	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah		0	0,00	13	25,00	31	61,00	7	13,72

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindagsar Kabupaten Pelalawan, 2019.

Kapasitas dan kapabilitas aparatur dipengaruhi dan berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Sumber daya Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan jika dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan, sebagaimana ditunjukkan Tabel 2.3, didominasi pada tingkat pendidikan Strata-1 dengan rasio mencapai 58,82% (30 orang) dan SLTA Sederajat dengan rasio 25,49% (13 orang).

Tabel IV.III: Kondisi Existing Sumber Daya ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Tk. Pendidikan Tahun 2016.

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)	%
1	Sarjana Strata II (S-2)	6	11,7
2	Sarjana Starata I (S-1)	30	58,85
3	Diploma (D-3)	2	3,9
4	SLTA sederajat	13	25,56
Jumlah		51	100,00

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindagsar Kabupaten Pelalawan, 2019.

Tabel IV.IV: Kondisi Existing Sumber Daya PTT Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Tk. Pendidikan Tahun 2016.

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (Org)	%
1	Sarjana Starata I (S-1)	15	24,59
2	Diploma (D-3)	3	4,91
3	SLTA sederajat	39	70,50
Jumlah		57	100,00

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindagsar Kabupaten Pelalawan, 2019.

Secara umum jika ditinjau dari golongan, tingkat pendidikan formal dan struktur umur sebagaimana ditunjukkan pada data sebelumnya, kondisi aparatur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan sudah cukup baik untuk menjadi modal dasar dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Namun, jika dibandingkan dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja yang dilakukan terhadap kebutuhan SDM Kabupaten Pelalawan, maka kondisi saat ini belum memenuhi jumlah dan komposisi ideal yang dibutuhkan.

Berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dengan type A yang disesuaikan dengan struktur organisasi perangkat daerah berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 seharusnya terdapat 99 (sembilan puluh sembilan) orang pada Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan. Untuk menyikapi adanya kesenjangan tersebut, sebagaimana ditunjukkan pada Grafik IV.V perlu dilakukan upaya penyesuaian dan diarahkan menuju kondisi yang menjadi arahan dari hasil analisis tersebut. Adapun jumlah kebutuhan SDM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah Perindustrian dan Perdagangan dalam 5 (lima) tahun mendatang disajikan pada tabel IV.V berikut.

Tabel IV.V: Kebutuhan SDM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan

JUMLAH PEGAWAI				
2017	2018	2019	2020	2021
50	58	75	90	99

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindagsar Kabupaten Pelalawan, 2019.

Bentuk Program Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perindustrian dan Perdagangan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
6. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
8. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
9. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
10. Program Penataan Struktur Industri
11. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
12. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK sistem Produksi
13. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
14. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
15. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Strategi yang digunakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Jumlah dan peran koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan dalam pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Pelalawan,

melalui strategi :

- a. Pengembangan dan pembinaan Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Pelalawan.
 - b. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan.
 - c. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan
 - d. Menumbuh kembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Industri Hilir yang kreatif, inovatif dan berdaya saing.
 - e. Meningkatkan Pengembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan.
 - f. Meningkatkan Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan dan Pengawasan Kemetrolagian dan Tertib Niaga.
2. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Pelalawan ***melalui strategi :***
 - a. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan ketrampilan SDM Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan.
 - b. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana dan pemasaran produk Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan.
 3. Peningkatan daya saing produk koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan, ***melalui strategi :***
 - a. Meningkatkan kemampuan Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan dalam mengembangkan produk-produk yang bermutu, kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing.
 - b. Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran, promosi produk Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan.
 - c. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Produk IKM.
 - d. Meningkatkan Kualitas Agro Industri.

4. Meningkatkan akses pembiayaan Koperasi Usaha Kecil Menengah

Perindustrian Dan Perdagangan *melalui strategi* :

- a. Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan
- b. Memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan usaha produksi dan pemasaran produk Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan.

5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan bagi Koperasi Usaha Kecil

Menengah Perindustrian dan Perdagangan *melalui strategi* :

- a. Meningkatkan kualitas layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel.
- b. Menyediakan kebijakan-kebijakan daerah yang lebih berpihak pada koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Pelalawan.

Arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan sebagai wadah kolektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan produktif.
2. Meningkatkan permodalan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan melalui bantuan Permodalan.
3. Meningkatkan Pengetahuan Pengelola Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan dan Pemasaran Produk Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan.
4. Meningkatkan peluang dan kesempatan pada Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan untuk mengali dan mengembangkan potensi ekonomi.
5. Menyusun strategi program pengembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan.
6. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Pengurus/Pengelola Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan.

B. Kedudukan, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan merupakan Perangkat Daerah dengan type A melaksanakan urusan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 70 Tahun 2016 telah menetapkan kedudukan, tugas fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan sebagai berikut :

1. Kedudukan

- a. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- b. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berazaskan otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan

penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Bupati selaku wakil Pemerintah dalam rangka Tugas Pembantuan.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan merupakan Unit Pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan yang langsung berada dan bertanggung jawab kepada Bupati yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan dibidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten serta penilaian atas hasil pelaksanaanya.

3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas

Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan sesuai dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 70 Tahun 2016 Kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan terdiri dari :

1. Kepala

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas sesuai dengan kewenangannya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja, koordinasi, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan tugas dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi antara lain :

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- 2) Perumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas semua bidang secara terpadu.
- 3) Perumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas.
- 4) Pelaksanaan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas.
- 5) Perumusan Kebijakan pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga Dinas.
- 6) Perumusan Kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
- 7) Penginventarisasian permasalahan-permasalahan guna menyiapkan petunjuk pemecahan masalah.
- 8) Perumusan kebijakan pengelolaan administrasi pengelolaan pegawai.
- 9) Perumusan Kebijakan administrasi pengelolaan keuangan.
- 10) Perumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas.
- 11) Perumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas.
- 12) Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas.
- 13) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan

- 14) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi/lembaga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- 15) Pelaksanaan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 16) Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari:

a. Subbagian Program

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana, program dan anggaran Subbagian Program dan Keuangan berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 2) Koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 3) Menyusun rincian kerja sub bagian program dan keuangan berdasarkan program kerja bagian tata usaha.
- 4) Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja dinas.
- 5) Menyusun rencana operasional dan mengkoordinasikan kegiatan dan program kerja dinas.
- 6) Melaksanakan penyusunan rencana strategis dinas.
- 7) Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan menunjang pelaksanaan tugas.
- 8) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja di lingkungan dinas.
- 9) Menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (lakip), laporan tahunan, dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (lppd).
- 10) Menyiapkan bahan pelaksanaan anggaran dalam bentuk dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (dppa) dinas.
- 11) Melaksanakan pengawasan laporan administrasi keuangan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan.
- 12) Menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran dinas.
- 13) Menyelenggarakan administrasi pembukuan pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
- 14) Menyelenggarakan pembukuan daftar gaji pegawai.

- 15) Menyelenggarakan pembayaran gaji pegawai.
- 16) Menyampaikan sarana dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- 17) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 18) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 19) Melaksanakan tugas lain dari sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.;
- 20) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- 21) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 22) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Subbagian Program dan Keuangan.
- 23) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 24) Melaksanakan tugas kedinasan lain dan Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana, program dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- 3) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
- 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 5) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Subbagian Keuangan:

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- 1) menyusun rencana, program dan anggaran Subbagian Keuangan berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang

tugasnya.

- 3) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Subbagian Keuangan.
- 5) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan, kerjasama dan bantuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi di kabupaten Pelalawan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Bidang Pengembangan Koperasi mempunyai fungsi antara lain :

- 1) Perumusan Rencana dan Program Operasional pembinaan Pengembangan SDM Koperasi Usaha dan Kelembagaan Koperasi.
- 2) Penyusunan Pedoman Penyuluhan tentang kebijakan peraturan dan ketentuan dalam Pemberian Akta Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Koperasi.
- 3) Penjabaran Juknis Pembinaan SDM Koperasi, Usaha Koperasi dan Kelembagaan Koperasi.
- 4) Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan SDM Koperasi, Usaha Koperasi dan Kelembagaan Koperasi.
- 5) Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya dan instansi sektoral yang terkait dalam rangka Pembinaan Koperasi.
- 6) Pelaksanaan Evaluasi hasil penelaahan tentang peningkatan SDM Koperasi, Pengembangan Usaha Koperasi dan Kelembagaan Koperasi.
- 7) Pemantauan Pelaksanaan Pengembangan Peningkatan SDM Koperasi, Pengembangan Usaha, dan Kelembagaan Koperasi.
- 8) Penghimpunan Rencana kerja seksi pengembangan SDM, seksi Pengembangan usaha koperasi dan seksi kelembagaan.
- 9) Pelaksanaan Rapat dan pemberian petunjuk teknis dalam pelaksanaan Tugas untuk pemberdayaan koperasi di seksi pengembangan SDM koperasi.

- 10) Penghimpunan Data/informasi pengembangan Koperasi.
- 11) Pelaksanaan evaluasi atas perkembangan Koperasi.
- 12) Pemberian data/informasi yang dibutuhkan Kepala Dinas di bidang Pengembangan Koperasi.
- 13) Pelaksanaan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 14) Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Dinas sesuai dengan bidang sesuai dengan bidang.

Bidang Koperasi terdiri dari:

a. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) Merencanakan program kegiatan pertahun berdasarkan tugas fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3) Menghimpun dan menginventarisasi serta mengevaluasi dan memverifikasi pendirian koperasi perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi serta pembukaan kantor cabang dan proses perizinan usaha koperasi.
- 4) Memberikan saran dan pertimbangan pada bidang tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pikiran dalam mengambil keputusan terhadap pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi.
- 5) Melaksanakan koordinasi pembinaan bimbingan teknis dan evaluasi pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi.
- 6) Melaksanakan penilaian koperasi berprestasi.
- 7) Melakukan verifikasi dan pengusulan nomor induk koperasi (nik) ke kementerian koperasi dan ukm.
- 8) Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi secara rutin maupun berkala.
- 9) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- 10) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 11) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pembinaan Kelembagaan

dan Usaha Koperasi.

- 12) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi

Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) Menghimpun dan menginventerisasi fasilitasi pembiayaan koperasi dalam pembinaan dan pengembangan ksp dan usp koperasi.
- 3) Memberikan saran dan pertimbangan kepada bidang tentang fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pikiran dalam mengambil keputusan.
- 4) Melaksanakan koordinasi pembinaan dan perumusan dalam rangka menetapkan prosedur bantuan modal kepada usp dan usp.
- 5) Melaksanakan pemberian rekomendasi permodalan kepada ksp dan usp.
- 6) Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi fasilitasi pembiayaan koperasi yang dibutuhkan.
- 7) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- 8) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 9) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi.
- 10) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Penyuluhan, Pelatihan dan Pengawasan Koperasi

Seksi Penyuluhan, Pelatihan dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Penyuluhan, Pelatihan dan Pengawasan Koperasi berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- 2) Menghimpun dan menginventerisasi penyuluhan pelatihan dan

pengawasan koperasi dalam pembinaan dan pengembangan koperasi.

- 3) Memberikan saran dan pertimbangan kepada bidang tentang penyuluhan pelatihan dan pengawasan koperasi tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pikiran dalam mengambil keputusan.
- 4) Melaksanakan koordinasi pembinaan dan perumusan dalam rangka menetapkan prosedur dan peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi penyuluhan pelatihan dan pengawasan koperasi kepada gerakan koperasi.
- 5) Melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan serta melakukan tugas pokok seksi penyuluhan pelatihan dan pengawasan koperasi dan mengatur pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan dan pengawasan tentang peraturan dan kebijakan perkoperasian kepada gerakankoperasi.
- 6) Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi penyuluhan pelatihan dan pengawasan koperasi yang dibutuhkan.
- 7) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- 8) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 9) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Penyuluhan, Pelatihan dan Pengawasan Koperasi.
- 10) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan Perumusan dan penjabaran kebijakan teknik, penyediaan dukungan, kerjasama dan bantuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kelembagaan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Pelalawan.

Untuk menyelenggarakan tugas di maksud, Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi antara lain :

- 1) Penyiapan rencana program bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknik melalui kemitraan usaha.
- 2) Penyiapan rencana program perumusan, penjabaran kebijakan teknik fasilitasi pembiayaan dan bimbingan kepada pengembangan usaha mikro, kecil, menengah.
- 3) Penyiapan rencana program dan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknik, serta pemberian dukungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah.
- 4) Penyiapan rencana program bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dalam penyuluhan, pelatihan bagi usaha mikro, kecil, menengah.
- 5) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang usaha mikro, kecil, menengah.
- 6) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan kebijakan di Bidang usaha mikro, kecil, menengah.
- 7) Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada seksi pengembangan dan pembinaan UMKM, seksi usaha dan kemitraan umkm dan seksi sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah;
- 8) Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada seksi pengembangan dan pembinaan UMKM, seksi usaha dan kemitraan umkm dan seksi sarana prasarana UMKM.
- 9) Melayani usaha mikro, Kecil, menengah sesuai Kebutuhan dan Pengembangan UMKM.
- 10) Melaksanakan Pembinaan ketrampilan UMKM dalam pengembangan dalam meningkatkan mutu hasil produksi.
- 11) Mempromosikan Produk Unggulan Usaha Kecil pada event Nasional, Regional dan Daerah.
- 12) Mendata Usaha mikro, kecil dan menengah sesuai kebutuhan dan Pengembangan Usahanya.
- 13) Memfasilitasi Label Halal dan higienis dan Kadaluarsa Produk UMKM.
- 14) Melaksanakan temu usaha antar UMKM.
- 15) Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Dinas sesuai dengan bidang sesuai dengan bidang.

Bidang UMKM terdiri dari:

a. Seksi Pengembangan dan Pembinaan UMKM

Seksi Pengembangan dan Pembinaan UMKM mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Pengembangan dan Pembinaan UMKM berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) Menghimpun dan menginventerisasi serta mengumpulkan dan mengelola data usaha mikro kecil menengah pemasaran produk usaha mikro, menjabarkan dan menyusun pedoman teknis pemberdayaan usaha mikro menengah akses perkuatan dan kelayakan usaha bagi pengembangan usaha mikro fasilitasi informasi usaha kesempatan berusaha dan dukungan bagi usaha mikro kecil menengah.
- 3) Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi pengembangan dan pembinaan usaha mikro kecil menengah secara rutin maupun berkala.
- 4) Mendata usaha mikro kecil dan menengah secara kuantitas dan jenis usaha.
- 5) Melayani usaha mikro kecil dan menengah sesuai kebutuhan dan pengembangan usaha UMKM.
- 6) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan administrasi manajemen bagi UMKM dan membuat proposal sederhana.
- 7) Melaksanakan pembinaan ketrampilan UMKM dalam pengembangan usaha dan meningkatkan mutu hasil produksi.
- 8) Memfasilitasi label halal higienis dan kadaluarsa produk UMKM.
- 9) Mempromosikan produk unggulan usaha kecil pada even nasional, regional dan daerah.
- 10) Melaksanakan temu usaha antar UMKM.
- 11) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- 12) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 13) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pengembangan dan Pembinaan UMKM.
- 14) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang UMKM sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Usaha dan Kemitraan UMKM

Seksi Usaha dan Kemitraan UMKM mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Usaha dan Kemitraan UMKM berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) Menghimpun dan menginventerisasi serta pengumpulan dan pengelolaan

data usaha dan kemitraan umkm, penjabaran dan kerja sama usaha kemitraan umkm.

- 3) Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi usaha dan kemitraan usaha mikro kecil menengah secara rutin maupun berkala.
- 4) Mendata sumber-sumber fasilitas yang berasal dari Pemerintah dan Pihak ke tiga.
- 5) Melayani UMKM sesuai kebutuhan dan kewenangan.
- 6) Membuat pedoman Fasilitas UMKM yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pelalawan.
- 7) Melaksanakan temu usaha /pertemuan antara calon Lembaga /Badan /usahawan untuk memfasilitasi dengan calon UMKM penerima fasilitas.
- 8) Memfasilitasi ikatan kerjasama yang saling menguntungkan antara lembaga/Badan/Usahawan untuk memfasilitasi dengan calon UMKM penerima fasilitas.
- 9) Mendata Lembaga/Badan /Usahawan dan UMKM yang telah memfasilitasi dan menerima fasilitas.
- 10) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- 11) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 12) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Usaha dan Kemitraan UMKM.
- 13) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang UMKM sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Sarana Prasarana UMKM.

Seksi Sarana Prasarana UMKM mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Sarana Prasarana UMKM berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) Menghimpun dan menginventarisasi. serta pengumpulan dan pengelolaan data kebutuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan akses produksi, distribusi dan promosi serta pemasaran produk umkm serta kelengkapan sarana dan prasarana UMKM.
- 3) Mengidentififikasi sarana dan prasarana UMKM.
- 4) Melaksanakan magang bagi UMKM pada pihak ke tiga.
- 5) Monitoring dan mengevaluasi sarana dan prasarana UMKM.
- 6) Memfasilitasi pencarian pangsa pasar produk UMKM.

- 7) Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi sarana dan prasarana umkm secara rutin maupun berkala.
- 8) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- 9) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Sarana Prasarana UMKM.
- 11) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang UMKM sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas merencanakan pembangunan industri, penerbitan perizinan, melengkapi data sistem informasi industri nasional.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Bidang Perindustrian mempunyai fungsi antara lain :

- 1) Penetapan dan penyusunan rencana pengembangan industri daerah.
- 2) Menyusun rencana dan program kerja bidang industri.
- 3) Penerbitan dan Pembinaan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Izin Usaha Industri (IUI) Menengah.
- 4) Penerbitan dan Pembinaan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Industri Kecil dan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Menengah.
- 5) Penerbitan dan Pembinaan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten.
- 6) Sistematis penyampaian pelaporan informasi industri.
- 7) Melaksakan koordinasi dan supervisi pengembangan industri.
- 8) Melakukan perumusan kebijakan pengembangan industri hilir hasil pertanian.
- 9) Melaksanakan monitoring, pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Menengah.
- 10) Memberikan rekomendasi permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pada Industri Kecil Menengah.
- 11) Melaksanakan pembinaan mutu/kualitas hasil produksi industri sesuai SNI, Barcode, Halal dan Tanggal Kadaluarsa (Expired date).
- 12) Pelaksanaan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

- 13) Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perindustrian terdiri dari:

a. Seksi Industri Agro dan Kimia

Seksi Industri Agro dan Kimia mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Industri Agro dan Kimia berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan industri agro dan kimia.
- 3) Melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan industri agro dan kimia.
- 4) Menyusun dan menetapkan bidang usaha industri agro dan kimia prioritas daerah.
- 5) Melakukan perumusan kebijakan pengembangan industri hilir hasil perkebunan, kehutanan, pertanian dan perikanan.
- 6) Melaksanakan pengembangan teknologi inovasi industri agro dan kimia.
- 7) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- 8) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 9) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Industri Agro dan Kimia.
- 10) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Pengembangan Usaha Industri

Seksi Pengembangan Usaha Industri mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Pengembangan Usaha Industri berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan usaha industri.
- 3) Melaksanakan pelatihan, pembinaan dan fasilitasi sarana prasarana industri.
- 4) Melaksanakan pendataan terhadap potensi pengembangan usaha industri.
- 5) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri.
- 6) Melaksanakan pengembangan sentra dan klaster usaha industri daerah.

- 7) Merumuskan dan melaksanakan pemberian rekomendasi izin usaha industri.
- 8) Melaksanakan konsultasi pembinaan dan pengembangan usaha industri.
- 9) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- 10) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 11) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pengembangan Usaha Industri.
- 12) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri

Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) Meyiapkan konsep-konsep perumusan pelaksanaan dalam rangka pengembangan Industri kecil menengah.
- 3) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan Industri kecil menengah.
- 4) Monitoring dan evaluasi data jumlah dan jenis usaha Industri kecil menengah.
- 5) Memberikan rekomendasi permohonan hak kekayaan Intelektual (hki) pada Industri kecil menengah.
- 6) Melaksanakan pembinaan mutu/kualitas hasil produksi incklstri sesuai sni, *barcode*, halal dan tanggal kadaluarsa.
- 7) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- 8) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 9) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri.
- 10) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perizinan dan fasilitasi sarana distribusi perdagangan, melakukan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor dan pelaksanaan metrologi legal.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Bidang Perdagangan mempunyai fungsi antara lain :

- 1) Penyusunan pedoman teknis program dalam mendukung pengembangan usaha perdagangan.
- 2) Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
- 3) Penerbitan Tanda Daftar Gudang dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB).
- 4) Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), untuk penerimaan waralaba dalam negeri dan luar negeri beserta lanjutannya.
- 5) Pemeriksaan fasilitas penyimpanan barang berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pe-label-an barang berbahaya.
- 6) Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan beserta pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat.
- 7) Pemantauan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah serta melakukan operasi pasar.
- 8) Pengawasan pupuk dan pestisida dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi.
- 9) Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang lokal, pameran dagang nasional, dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan beserta kampanye pencitraan produk ekspor.
- 10) Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.
- 11) Penyiapan pembinaan dan pengembangan serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana Perdagangan.
- 12) Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijaksanaan di bidang Perdagangan.
- 13) Memberikan pembinaan, dukungan dan fasilitasi ekspor dan impor.
- 14) Pelaksanaan Pembagian tugas, arahan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

- 15) Pelaksanaan tugas lain dari Kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perdagangan terdiri dari:

a. Seksi Pengembangan Perdagangan dan Promosi

Seksi Pengembangan Perdagangan dan Promosi mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Pengembangan Perdagangan dan Promosi berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) Melaksanakan program di bidang sektoral pengembangan perdagangan, pemasaran, promosi serta melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait.
- 3) Melakukan pembinaan, sosialisasi kebijakan, peraturan perundang-undangan dan informasi lainnya terkait dukungan dan bantuan kerjasama dalam peningkatan perdagangan ekspor dan impor.
- 4) Melakukan pendataan dan pelaporan ekspor dan impor.
- 5) Menerbitkan dan membina perizinan di bidang perdagangan.
- 6) Melaksanakan pemantauan harga bahan kebutuhan pokok dan operasi pasar.
- 7) Melaksanakan pemantauan, pendataan dan pembinaan pedagang kaki lima.
- 8) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- 9) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pengembangan Perdagangan dan Promosi.
- 11) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Kemetrolgian dan Tata Niaga

Seksi Kemetrolgian dan Tata Niaga mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Kemetrolgian dan Tata Niaga berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (uttp) yang berada di masyarakat.
- 3) Melaksanakan penyidikan dibidang metrologi legal.
- 4) Melakukan pengawasan terhadap minuman beralkohol.

- 5) Melakukan pemeriksaan fasilitas penyimpanan barang berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan.
- 6) Mengawasi pupuk bersubsidi, pestisida dan barang bersubsidi lainnya.
- 7) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- 8) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 9) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Kemetrollogian dan Tata Niaga.
- 10) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Pengelolaan Pasar

Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai tugas:

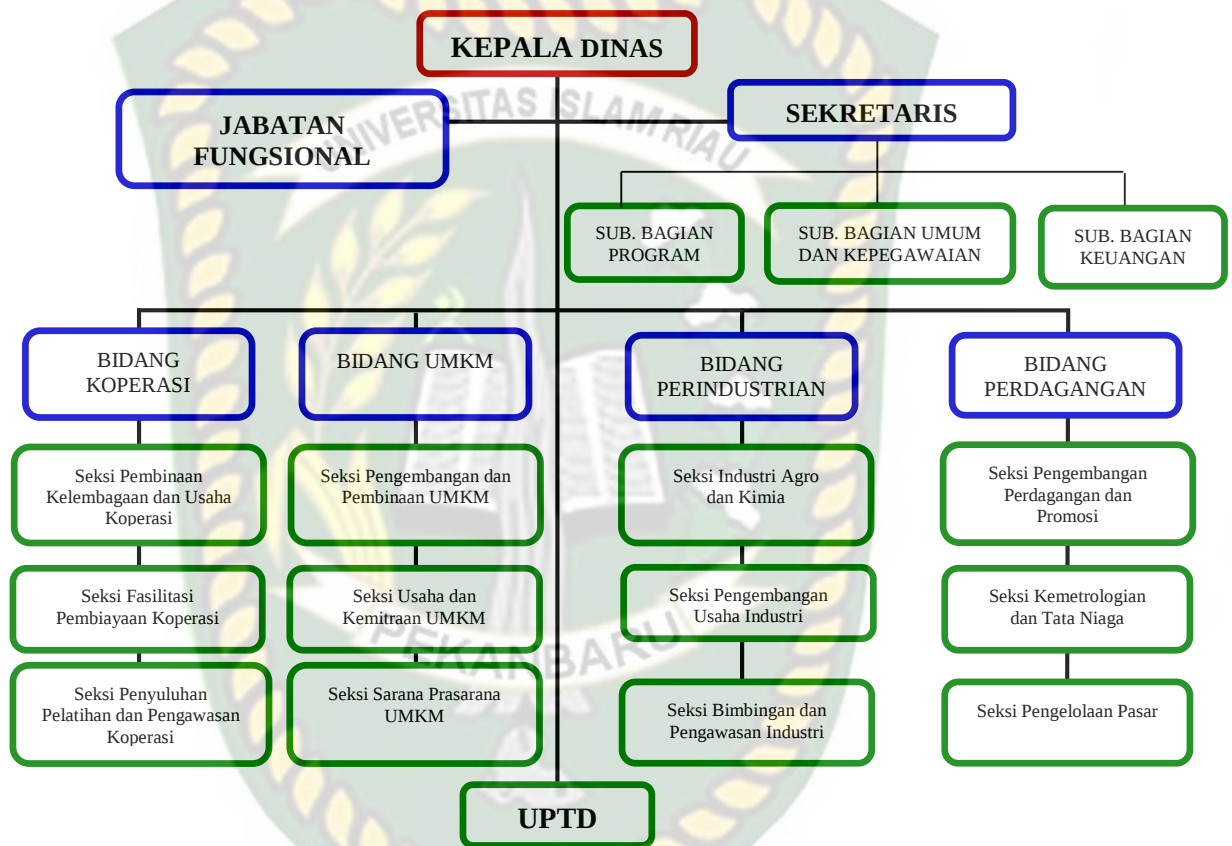
- 1) Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Pengelolaan Pasar berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) Menyiapkan rencana perizinan pasar dan kerjasama dalam pengelolaan pasar.
- 3) Menyusun bahan kebijakan teknis pengelolaan pasar.
- 4) Melaksanakan perencanaan, pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pasar.
- 5) Melaksanakan pemantauan dan penilaian pasar.
- 6) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar.
- 7) Melaksanakan pemantauan ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar.
- 8) Melakukan pendataan pasar dan pembinaan pengelola pasar.
- 9) Melaksanakan pemetaan pertumbuhan dan pengembangan pasar.
- 10) Melaksanakan peningkatan sumber daya manusia tenaga retribusi pasar dan pengelola pasar.
- 11) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- 12) Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 13) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pengelolaan Pasar.
- 14) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan

Berikut bagan struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan :

Gambar IV.I : Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan



Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Pelalawan, 2019

D. Sejarah Ringkas Rumah Batik Andalan

Rumah Batik Andalan (RBA) terletak di pusat Kabupaten Pelalawan yaitu di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Usaha kerajinan batik di Kabupaten Pelalawan dilakukan dengan kelompok usaha, dimana terdapat 2 pusat usaha kerajinan Batik Bono yang terletak di lingkungan pabrik RAPP tepatnya pada Balai Pelatihan

Pengembangan Usaha Terpadu (BPPUT) Perumahan Townset 2 dan di Gang.2000 dibelakang Pasarbaru. Dengan motif atau corak yang identik dengan simbol-simbol budaya Provinsi Riau Khususnya di Kabupaten Pelalawan.

Rumah Batik Andalan (RBA) ini merupakan program *Community Development* (CD) dari Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang terletak di Kecamatan Pangkalan Kerinci, PT. RAPP mulai melakukan upaya untuk memberdayakan perempuan lokal dengan memberikan mereka keterampilan baru dan membantu mereka untuk mendapatkan uang mereka sendiri.

Dimulai dengan program pelatihan batik Bono tahun 2013. Usaha program pelatihan batik Bono didukung sekitar 60 pengrajin batik. Dimana setiap perajin batik harus menguasai mencating, menggambar, mewarnai, serta memiliki kreatifitas. Dan dilakukan pendampingan dimulai dari pengenalan alat hingga teknik membatik.

Sebagai komitmen PT. RAPP dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat diwilayah kerja yang diwujudkan dengan mendorong pemberdayaan kemandirian masyarakat yang dimulai dengan program pelatihan Batik Bono. Hingga akhirnya terbentuk kelompok usaha batik masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pada tahun 2013. Bentuk komitmen lainnya PT. RAPP tersebut, selain memfasilitasi pelatihan PT.RAPP juga memberikan sumbangan Rumah Batik Andalan tahun 2013 yang diresmikan PT. RAPP bersama ketua Bhayangkari Riau Santi Condro Kirono dan didampingi oleh ketua TP PKK Pelalawan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menyampaikan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Rumah Batik Andalan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan yang berkaitan dengan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono), dimana dalam pembahasan bab ini peneliti melakukan analisa dengan menggunakan teori yang ada sesuai dengan indikator variabel penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono) terlebih dahulu kita melihat responden penelitian.

A. Identitas Responden

Penelitian yang dilakukan ini merupakan pengkajian tentang bagaimana Evaluasi Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono) dengan demikian untuk memenuhi data yang akan dianalisa sebagai bahan informasi Evaluasi Tugas Dinas kepada Industri Batik Bono tersebut maka perlu mencari data yang akurat dari responden yang mengetahui tentang pelaksanaan tugas pembinaan tersebut sehingga peneliti membagi kriteria responden sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada identitas responden terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya serta dalam wawancara dan mengisi angket atau kuisioner yang peneliti berikan, untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin pada Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Pelalawan dan Pengrajin Batik Bono dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.I : Distribusi Jumlah Responden Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dan Pengrajin Batik Bono Rumah Batik Andalan.

No	Kelompok Responden	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Dinas Koperasi, UKM, Perindag	6	2	8
2	Pengrajin Rumah Batik Andalan	1	10	11
Jumlah		7	12	19
Presentase		42%	58%	100%

Sumber : Olahan Peneliti, 2019.

Dari tabel V.I diatas diterangkan bahwa untuk Ditribusi jumlah responden Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dan Pengrajin Batik Bono untuk responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 7 orang dengan persentase 42% sedangkan jumlah responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 12 oranag dengan persentase 58%.

2. Usia Responden

Berdasarkan hasil kuisioner tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten

Pelalawan dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono). Yang telah disebarkan kepada seluruh Responden Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Pelalawan serta Pengrajin Rumah Batik Andalan.

Usia merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada semua orang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, selain itu usia juga berpengaruh pada produktivitas kerja. Berdasarkan angket ataupun kuisioner yang disebarkan kepada responden maka diketahui bahwa responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.II : Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Usia Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dan Pengrajin Batik Bono Rumah Batik Andalan.

No	Usia	Kelompok Responden		Jumlah	Prsentase
		Dinas Koperasi, UKM, Perindag	Pengrajin RBA		
1	21-30 Tahun	-	6 Orang	6	31%
2	31-40 Tahun	1 Orang	2 Orang	3	16%
3	41-50 Tahun	4 Orang	3 Orang	7	37%
4	> 50	3 Orang	-	3	16%
Jumlah		8 Orang	11 Orang	19	100%

Sumber : Olahan Peneliti, 2019.

Berdasarkan tabel V.II diatas dapat diketahui bahwa ada 6 orang pengrajin RBA yang juga berada pada rentang usia 21-30 tahun, sehingga jumlah keseluruhan responden yang berada pada rentang usia 21-30 tahun adalah 6 orang dengan persentase 31% dari jumlah responden secara keseluruhan.

Selanjutnya pada rentang usia 31-40 tahun ada 1 orang pegawai Industri Kecil Menengah, dan pengrajin RBA yang berusia 31-40 tahun juga berjumlah 2 orang.

Sehingga jumlah keseluruhan responden pada rentang usia 31-40 tahun adalah 4 orang dengan presentase 16% dari keseluruhan responden.

Kemudian pada rentang usia 41-50 tahun ada 4 orang responden dari Dinas Koperasi, UKM, Perindag dan untuk Pengrajin RBA dengan 3 orang. Sehingga jumlah keseluruhan responden yang berada pada rentang usia 41-50 tahun berjumlah 6 orang dengan presentase 37%. Dan terakhir ada 3 orang dari Dinas Koperasi, UKM, Perindag yang berada pada rentang usia > 50 tahun dengan presentase 16%.

3. Pendidikan Responden

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin matang pola pikir seseorang dalam berbuat dan bertindak laku dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Pendidikan merupakan suatu usaha seseorang dalam rangka memberikan pengembangan terhadap pola pikir orang lain dalam memahami dan menilai sesuatu dimana dari tingkat pendidikan kita akan mengetahui kemampuan seseorang yang cenderung akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku setiap orang. Dan pendidikan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi jawaban yang diberikan oleh responden, semakin tinggi pendidikan responden maka semakin baik pula jawaban serta penjelasan yang diberikan terhadap rangkaian pertanyaan yang disajikan peneliti dalam kuisisioner penelitian yang telah dilakukan, dari hasil penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelawawan dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono).

Maka dapat diketahui bahwa tingkatan pendidikan responden yang masuk ruang lingkup penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.III : Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dan Pengrajin Batik Bono Rumah Batik Andalan.

No	Pendidikan	Kelompok Responden		Jumlah	Persentase
		Dinas Koperasi, UKM, Perindag	Pengrajin RBA		
1	SD/Sederajat	-	2	2	10 %
2	SMP/Sederajat	-	-	-	-
3	SMA/Sederajat	-	7	7	38 %
4	D3	1	1	2	10 %
5	S1	5	1	6	32 %
6	S2	2	-	2	10 %
Jumlah		8	11	19	100 %

Sumber : Olahan peneliti, 2019

Dari tabel V.III diatas dapat dilihat bahwa ada 2 orang Pengrajin RBA dengan presentase 10% berpendidikan SD/Sederajat. Kemudian pada SMA/Sederajat ada 7 orang dari Pengrajin RBA sehingga jumlah keseluruhan responden pada tingkat pendidikan SMA/Sederajat yaitu 7 orang dengan presentase 38%. Selanjutnya pada tingkat D3 ada 1 orang dari Dinas, UKM, Perindag dan untuk pengrajin RBA ada 1 orang maka jumlah keseluruhan responden pada tingkat pendidikan D3 berjumlah 2 orang dengan resentase 10%. Pada tingkat S1 untuk Dinas Koperasi, UKM, Perindag ada 5 orang dan untuk Pengrajin RBA ada 1 orang maka jumlah keseluruhan untuk responden pada tingakat pendidikan S1 berjumlah 6 orang dengan presentase 32%. Dan trakhir pada tingkat pendidikan S2 berjumlah 2 orang dari Dnas Koperasi, UKM, Perindag dengan presentase 10%.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui untuk identitas responden jika dipandang dari tingkat pendidikan maka menjadi beragam mulai dari perguruan

tinggi hingga terendah, namun jika dilihat dari tabel diatas, tingkat pendidikan dari Dinas Koperasi, UKM, Perindag terbilang memadai untuk kategori terpelajar dan terdidik. Oleh karena itu diharapkan para pegawai dapat bekerja sebaik mungkin melaksanakan tugasnya dengan efektif dan penuh rasa tanggung jawab.

B. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono).

Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono) yang dimaksud dalam penelitian ini yakni dilihat dari beberapa indikator penelitian yang sesuai rencana penelitian dalam peta pemikiran penelitian, selanjutnya dibahas sebagai berikut :

1. Pembinaan

Pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas Mathis (2002:112), pembinaan juga dapat diartikan bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.

Berikut tanggapan dari 15 responden yang mengisi angket atau kuisisioner mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.IV : Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pembinaan Pada Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono).

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Total
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Melakukan kegiatan analisis permasalahan IKM	-	12	3	15
2	Menetuan solusi dari permasalahan yang terjadi di RBA	-	8	7	15
3	Melakukan perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi di RBA	-	8	7	15
Jumlah		-	28	17	45
Skor		-	56	17	73
Kategori		Kurang Terlaksa			

Sumber : Olahan Peneliti, 2019

Berdasarkan tabel V.IV diatas untuk item pertanyaan 1 mengenai kegiatan analisis IKM dapat kita lihat bahwa 12 responden menyatakan cukup terlaksana, dengan alasan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan hanya berkunjung dan mereka tidak pernah membina, Dan 3 responden yang menyatakan Kurang terlaksana, dengan alasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan tidak pernah melakukan kunjungan ke Rumah Batik Andalan (RBA) dalam rangka analisis masalah Industri Batik Bono, Kunjungan yang dilakukan hanya untuk meminjam Kain Batik Bono, bukan dalam rangka menganalisis Permasalahan yang sedang dihadapi Industri Batik Bono.

Untuk item pertanyaan 2 mengenai penentuan solusi dari permasalahan yang terjadi di Rumah Batik Andalan (RBA) dapat kita lihat bahwa 8 responden yang menyatakan cukup terlaksana, dengan alasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan telah memberikan aspek produksi dan pemasaran yaitu dalam bentuk pemberian HaKI dalam kepada motif batik bono. Dan jawaban untuk kurang terlaksana berjumlah 7 responden, dengan alasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan tidak melakukan penentuan solusi dengan semestinya terhadap IKM batik bono yang tidak sesuai SOP pembinaan.

Untuk item pertanyaan 3 mengenai perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi di Rumah Batik Andalan (RBA) dapat kita lihat bahwa 8 responden yang menyatakan cukup terlaksana, dengan alasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan tidak melakukan perbaikan terhadap produksi batik bono yang dimana tidak menimbulkan kreatifitas baru sehingga motif batik yang diciptakan industri batik bono tidak bertambah. Dan jawaban untuk kurang terlaksana berjumlah 7 responden, dengan alasan para pengrajin batik tidak merasakan perbaikan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan. Adapun bentuk pembinaan yang harus dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dengan memberikan pelatihan kepada pengrajin untuk meningkatkan kemampuan pengrajin dalam membatik dan berkreatifitas. Dengan demikian melalui dari beberapa item pertanyaan yang di nilai oleh responden dapat diambil kesimpulan

bahwasannya tanggapan responden terhadap item-item pertanyaan dengan skor **73** yang berada pada kategori **Kurang Terlaksana**. Yakni rata-rata responden menyatakan bahwasannya pembinaan sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal.

Selanjutnya untuk memperkuat lagi hasil dari penelitian ini peneliti juga mewawancarai Bapak Fakharizal sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan mengenai pembinaan yang mereka laksanakan kepada Industri Batik Bono.

“iya, saya sangat setuju mendukung dengan adanya program pengembangan IKM apalagi khususnya pengembangan kepada industri batik bono, sesuai dengan saya katakana sebelumnya, bahwa saya disini adalah kepala dinas baru, jadi, saya tidak bisa bertanggung jawab terlalu detail tentang program pengembangan IKM kepada batik bono. Tetapi kalo untuk sekarang yang saya tahu sudah dilakukannya pembinaan kepada industri batik bono dan untuk jawaban teknisnya bisa langsung dengan kepala bidang yang menjawab.” (Fakharizal 25 November 2019)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Bapak Hasbi sebagai Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan mengenai fasilitasi sarana dan prasarana yang mereka laksanakan kepada Industri Batik Bono.

“yang namanya evaluasi sangat penting dalam berorganisasi dalam evaluasi pelaksanaan pengembangan industri selalu kami lakukan, guna mencapai tujuan dari program pengembangan industri. Kami selaku pelaksana program pengembangan industri selalu memperhatikan antara hasil kegiatan kami dengan rencana sebelumnya, untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan pelaksana kegiatan. Apakah berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil kegiatan seperti yang diharapkan untuk pelaksana pengembangan industri kepada industri batik bono kasi pengembangan telah memberikan pembinaan kepada industri batik bono, Informasi baru yang saya dapatkan, industri batik bono baru-baru ini membuat kelompok pembatik baru di desa lalang kabung, katanya ada workshopnya juga disana.” (Hasbi 10 Oktober 2019)

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Bapak Patriadi sebagai Kepala Seksi Pengembangan Usaha Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan mengenai pembinaan yang mereka laksanakan kepada Industri Batik Bono dapat dilihat dari kegiatan analisis permasalahan IKM kepada Industri Batik Bono yang dilaksanakan oleh seksi Pengembangan Usaha Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan ke Rumah Batik Andalan.

“Ya pembinaannya ada, kami arahkan kepada pembatik dalam bentuk pembukuan, tentang dari brapa yang masuk dan brapa yang keluar dalam penjualan, kemudian dari bentuk promosi kami sudah coba menghubungi dari beberapa hotel agar memasang benner dan kain batik untuk dikenalkan kepada pengunjung hotel, setelah itu pembinaan berupa prestasi, kami memberikan penghargaan kepadan Rumah Batik Andalan karna memenangkan lomba adikarya tingkat kabupaten.” (Patriadi 1 Oktober 2019)

Dalam hal kegiatan analisis permasalahan IKM sudah dilaksanakan oleh Seksi Pengembangan Usaha Industri dengan cara promosi ke luar daerah. Dalam dua tahun ini Kepala Seksi Pengembangan Usaha Industri mengatakan bahwa akan terus melakukan perbaikan kepada permasalahan yang terjadi pada Rumah Batik Andalan.

Dan dari hasil wawancara dengan Ibu Siti Nurbaya sebagai Ketua Rumah Batik Andalan, mengenai Pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan tidak terlaksana dengan baik sebab

“selama ini dari dinas perindustrian dan perdagangan ngga brani masuk, karna mungkin umkm batik bono ini binaan perusahaan, karena semuanya sudah di cover sama perusahaan, tapi dinas ada melakukan pembinaan, tetapi belum begitu besar hanya 10% lah yaa, cuman kalo dari pendataan mereka terus melakukan karna kitakan bentuknya koperasi.” (Siti Nurbaya, 10 Oktober 2019)

Dalam pernyataan Ibu Siti Nurbaya diatas dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan belum melakukan pembinaan dengan baik, seharusnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan memberikan solusi dan perbaikan terhadap Industri Batik Bono secara rutin dan berkala.

“pembinaan industri ini penting, karna untuk pengembangan industri batik kedepan ini, yang kita perlukan bukan ini ini aja, salah satunya ya kita mungkin perlu pemberdayaan masyarakat pelalawan untuk tahu bahwa batik bono ini bisa menjadi meta pencarian mereka, itu satu...”(Siti Nurbaya, 10 Oktober 2019)

Salah satu keinginan dari ibu Siti Nurbaya selaku ketua pengrajin Batik Bono di Rumah Batik Andalan adalah adanya pemberdayaan masyarakat disekitar Pelalawan, agar masyarakat disekitar pelalawan dapat bergabung di Rumah Batik Andalan. Yang mana, dalam jumlah pengrajin batik di Rumah Batik Andalan dari tahun ke tahun mengalami pengurangan. Dengan dilakukannya pemberdayaan masyarakat maka, masyarakat bisa mendapatkan penghasilan dari bekerja menjadi pembatik yang akhirnya dapat membantu perekonomian masyarakat.

Hasil observasi yang peneliti lakukan untuk indikator pembinaan disini peneliti melihat masih cukup terlaksana, karena pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan belum terlaksana dengan baik, sebab Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan tidak melakukan perbaikan masalah yang terjadi diRumah Batik Andalan.

2. Fasilitas Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Berikut tanggapan dari 15 responden yang mengisi angket atau kuisioner mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.V : Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden Terhadap Indikator Fasilitas Sarana dan Prasarana Pada Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono).

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Total
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pemberian bantuan SIKIM	-	5	10	15
2	Bantuan perlengkapan batik untuk RBA	-	-	15	15
3	Bantuan peralatan untuk RBA	-	-	15	15
Jumlah		-	5	40	45
Skor		-	10	40	50
Kategori		Kurang Terlaksa			

Sumber : Olahan Peneliti, 2019

Untuk item pertanyaan 1 mengenai Pemberian bantuan SIKIM dapat kita lihat bahwa 5 responden menyatakan cukup terlaksana, dengan alasan pemberian bantuan SIKIM sudah dilakukan, khususnya dalam permintaan tanah kepada

PT.RAPP. Dan yang menyatakan kurang terlaksana berjumlah 10 responden, yang artinya sudah terlaksana namun belum baik.

Untuk item pertanyaan 2 mengenai bantuan perlengkapan batik keseluruhan responden menyatakan kurang terlaksana yaitu berjumlah 15 responden, yang artinya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Tidak pernah memberikan bantuan perlengkapan kepada Industri Batik Bono.

Untuk item pertanyaan 3 mengenai bantuan peralatan untuk Rumah Batik Andalan keseluruhan responden menyatakan kurang terlaksana yaitu berjumlah 15 responden, yang artinya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan tidak pernah memberikan bantuan peralatan kepada Industri Batik Bono. Dengan demikian melalui dari beberapa item pertanyaan yang dinilai oleh responden dapat di ambil kesimpulan bahwasannya tanggapan responden terhadap item-item pertanyaan dengan skor 50 yang berada pada kategori **Kurang Terlaksana**. Yakni rata-rata responden menyatakan bahwasannya untuk fasilitasi sarana dan prasarana belum terlaksana.

Selanjutnya untuk memperkuat lagi hasil dari penelitian ini peneliti juga mewawancarai Bapak Fakharizal sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan mengenai fasilitasi sarana dan prasarana yang mereka laksanakan kepada Industri Batik Bono.

“Bentuk komitmen kami dalam pengembangan industri batik bono adalah kami sedang merencanakan pengembangan SIKIM untuk menjadi sentra untuk industri batik bono sekarang sedang menunggu tahanan hibah dari RAPP ya, semoga saja mereka mau memberikan sebidang tanah, nah nanti kita yang bagian SIKIMnya, dengan membuat proposal ke kementerian

perindustrian nanti disitulah pusat kegiatan produksi batik bono.”
(Fakharizal 25 November 2019)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Bapak Hasbi sebagai Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan mengenai fasilitasi sarana dan prasarana yang mereka laksanakan kepada Industri Batik Bono.

“sasaran dari evaluasi pengembangan batik bono adalah untuk mengetahui permasalahan yang di alami oleh industri batik bono dan dapat dilaksanakannya perbaikan pada permasalahan yang ada didalam industri batik bono untuk sekarang masalah sentra industri sedang direncanakan untuk pembangunan SIKIM untuk peralatan dan perlengkapan itu sudah dihandle oleh RAPP. Mereka yang menjadikan itu semua dan kami sekarang sedang menunggu apakah pihak RAPP mau memeberikan kami sebidang tanah untuk dibagunnya SIKIM.”(Hasbi 10 Oktober 2019)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Patriadi sebagai Kepala Seksi Pengembangan Usaha Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan mengenai fasilitasi sarana dan prasarana yang mereka berikan kepada Industri Batik Bono dapat dilihat dari pemberian bantuan SIKIM yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan.

“SIKIM itu harus mempunyai lahan, dalam satu kawasan pelaku usahanya itu bnyak, dari tempat penyimpanan bahan baku, tempat proses produksi dan outlet. Dari dinas mau beri bantuan SIKIM tetapi harus ada yang menyediakan tanah yang telah dihibahkan kurang lebih 600 persegi luasnya untuk membngun SIKIM, nanti gedungnya dibangun oleh kementrian, tetapi dalam waktu dekat ini dalam proses pencarian tanah untuk pembuatan SIKIM Batik Bono Tersebut.” (Patriadi, 1 Oktober 2019)

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Seksi Pengembangan Industri telah melaksanakan pemberian bantuan SIKIM kepada Indutri Batik Bono dengan cara masih mencari tanah hibah untuk membangun SIKIM Batik Bono.

Dan hasil wawancara dengan Ibu Siti Nurbaya sebagai Ketua Rumah Batik andalan, mengenai fasilitasi sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan kurang terlaksana sebab,

“kalo dalam industri batik bono SIKIM sangat di perlukan, sebetulnya kita mengharapkan pemerintah khususnya dinas turun langsung. karena apa yang ibu rasakan saat ini belum bantuan khusus dari dinas untuk batik bono. (Siti Nurbaya, 10 Oktober 2019)

Berdasarkan pernyataan Ibu Siti Nurbaya diatas dapat diketahui bahwa dari dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan belum memberikan bantuan kepada Rumah Batik Andalan.

“fsilitasi sarana dan prasana ini penting, kami selaku industri seharusnya di fasilitasi, karna untuk perkembangan batik kita kedepan kita perlu adanya kemajuan untuk Rumah Batik Andalan, kita juga malu dong kalo ada orang yang berkunjung ke rumah batik tapi mereka lihat peralatan sama perlengkapan kita kurang mendukung, sedangkan kalo di bilang batik bono salah satu unggulan pelalawan.” (Siti Nurbaya, 10 Oktober 2019)

Dalam pernyataan ibu Siti Nurbaya di atas dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan belum memberikan bantuan perlengkapan dan peralatan. Dengan hal ini para pengrajin masih menggunakan perlengkapan dan peralatan yang diberikan RAPP.

Hasil dari observasi yang peneliti lakukan untuk indikator fasilitasi sarana dan prasarana disini peneliti melihat masih kurang terlaksana, karena untuk fasilitasi sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan belum terlaksana dengan baik, sebab Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Pelalawan tidak memberikan perlengkapan dan peralatan kepada Industri Batik Bono, seharusnya dengan adanya perlengkapan dan peralatan bisa menghasilkan produksi yang maksimal.

3. Pengawasan

Seksi Bimbingan dan pengawasan industri berperan sebagai pemantau atau pengawas, artinya tugas Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri meliputi operasi internal untuk menilai keberhasilan kinerja. Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri juga harus membaca masalah dan peluang yang mungkin timbul sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Pengawasan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi, dalam kapasitas ini harus disimpan dan dipelihara sebaik-baiknya, karena informasi merupakan data yang sangat berharga untuk meningkatkan daya saing Industri Batik Bono. Dengan demikian Seksi Bimbingan dan Pengawasan Industri harus memperbanyak kegiatan yang berhubungan dengan informasi seperti membaca berita, laporan, serta menjaga kontak relasi dengan RBA Abd. Rohman (2018:52). Pengawasan selalu diartikan sebagai keseluruhan upaya organisasi untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi serta personil dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya yang memanfaatkan sejumlah fasilitas dan sumberdaya lainnya berlangsung sesuai dengan ketentuan atau standar yang telah ditetapkan.

Berikut tanggapan dari 15 responden yang mengisi angket atau kuisioner mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.VI : Distribusi Klasifikasi Jumlah Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pengawasan Pada Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono).

No	Item Pertanyaan	Jawaban Responden			Total
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Melakukan kunjungan ke RBA	1	8	6	19
2	Membandingkan serta menilai rencana, waktu, dan hasil kegiatan IKM	-	6	9	19
3	Pemantauan prestasi RBA	2	7	6	19
Jumlah		3	21	21	45
Skor		9	42	21	72
Kategori		Kurang Terlaksa			

Sumber : Olahan Peneliti, 2019

Berdasarkan tabel V.VI diatas untuk item pertanyaan 1 mengenai bagaimana pelaksanaan kunjungan ke Rumah Batik Andalan (RBA) yakni pada kategori Terlaksana menunjukkan jumlah responden tersebut sebanyak 1 orang yang menyatakan terlaksana, dengan alasan bahwa seharusnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Pelalawan lebih sering lagi mengunjungi Rumah Batik Andalan (RBA). Jawaban responden yang menyatakan Cukup Terlaksana sebanyak 8 orang. Dengan alasan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Pelalawan hanya berkunjung dan mereka tidak pernah melakukan pengembangan. Dan yang menjawab Kurang Terlaksana berjumlah 6 orang responden, dengan alasan dari pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan

perdagangan Kabupaten Pelalawan hanya untuk membeli batik tidak dalam pengembangan.

Untuk item pertanyaan 2 mengenai Membandingkan serta menilai rencana, waktu, dan hasil kegiatan IKM yaitu Industri Batik Bono dapat kita lihat bahwa 6 responden yang menyatakan Cukup Terlaksana, dengan alasan kegiatan kunjungan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Pelalawan berkaitan dengan kegiatan membanding serta menilai waktu, dan hasil kegiatan Rumah Batik Andalan sebagai pusat Industri Batik Bono. Dan jawaban untuk Kurang Terlaksana berjumlah 9 responden, dengan alasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Pelalawan Hanya berkujung tampak melaksanakan kegiatannya yaitu pengawasan.

Untuk item pertanyaan 3 tentang pemantauan prestasi Rumah Batik Andalan (RBA) responden yang menjawab terlaksana berjumlah 2 orang, dengan alasan bahwa selaku pelaksana Pengembangan Industri Batik Bono sudah seharusnya melakukan pengawasan terhadap Rumah Batik Andalan (RBA) khusus dalam pemantauan prestasi yang telah diukir oleh Industri Batik Bono. Yang menjawab pada kategori cukup terlaksana berjumlah 7 responden, dengan alasan sudah terlaksana namun belum maksimal dalam pemantauan prestasi Rumah Btaik Andalan (RBA). Dan yang menjawab Kurang terlaksana berjumlah 6 responden, dengan alasan para perajin belum mengetahui pemantauan prestasi seperti apa yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindsutrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan kepada Industri Batik Bono. Sehingga dapat ditarik kesimpulan terhadap indikator pengawasan dapat dikatakan cukup

terlaksana yakni dengan berada pada rentang skor 72 yang berada pada kategori **Cukup terlaksana**. Yakni rata-rata responden menyatakan bahwasannya pengawasan sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal seperti adanya membandingkan serta menilai rencana dan hasil kegiatan Industri Batak Bono serta menganalisis masalah Industri Batik Bono.

Selanjutnya untuk memperkuat lagi hasil dari penelitian ini peneliti juga mewawancarai Bapak Fakharizal sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan mengenai pengawasan yang mereka laksanakan kepada Industri Batik Bono.

“sama halnya dengan judul kamu, kami juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bidang-bidang dibawah kami. kami Tanya bagaimana perkembangan koperasi-koperasi kita, UKM dan IKM kita. Bila ada masalah maka perlu dilakukannya kunjungan secara langsung, melihat dan menanyakan bagaimana keadaan koperasi, IKM dan UKM mereka yang nantinya setiap bidang dan seksi yang berkaitan yang akan bekerja sesuai SOP masing-masing.” (Fakharizal 25 November 2019)

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Bapak Hasbi sebagai Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan mengenai pengawasan yang mereka laksanakan kepada Industri Batik Bono.

“untuk saat ini kami sudah mempromosikan batik bono keluar daerah untuk memperkenalkan batik bono keranah lebih luas karna kita juga bangga bahwa pelalawan juga punya batik dan batik bono juga sedang menjual produk unggulan daerah sebab itu sudah menjadi tanggung jawab kami dalam pemantauan prestasi batik bono agar apa ya? Biar batik bono itu uterut terkenal dan intinya dimasyarakat luas bukan hanya pelalawan tapi diluar pelalawan juga harus terkenal.” (Hasbi 10 Oktober 2019)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Patriadi sebagai Kepala Seksi Pengembangan Usaha Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan mengenai pengawasan yang

mereka laksanakan kepada Industri Batik Bono dapat dilihat dari seringnya kunjungan yang dilaksanakan oleh Seksi Pengembangan Usaha Industri ke Rumah Batik Andalan.

“Dalam kunjungan yang kami laksanakan ke Rumah Batik Andalan, sudah cukup sering ya, kami melakukan kunjungan untuk melihat kegiatan para pembatik disana serta mengawasi kegiatan pembatik tersebut, dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan Rumah Batik Andalan serta perkembangan para pembatik itu sendiri dalam menjalankan usahanya sebagai Industri, yang mana produknya sudah menjadi produk unggulan di daerah kita ya”(Patriadi, 1 Oktober 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa, untuk kunjungan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Seksi Pengembangan Usaha Industri. Dan mengenai kegiatan membandingkan serta menilai rencana, waktu, dan hasil kegiatan Industri Batik Bono dapat kita lihat bahwa Seksi Pengembangan Usaha Industri belum berjalan.

Dan dari hasil wawancara dengan Ibu Siti Nurbaya sebagai Ketua Rumah Batik Andalan, mengenai pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan tidak terlaksana dengan baik sebab

“Untuk kunjungan yang dilaksanakan oleh Dinas, itu memang sering datang kemari, tapi yang namanya menilai, mengawasi, membandingkan kegiatan kami dengan hasil dan rencana, apalagi dalam menganalisis masalah Industri kami, itu belum ada kami rasakan. Kunjungan yang dilakukan oleh Dinas ya hanya berkunjung, dan kadang mereka membawa kain batik kami untuk dipinjam. Biasanya untuk dibawa pameran atau perlombaan. Dinas biasanya begitu”(Siti Nurbaya, 10 Oktober 2019)

Berdasarkan pernyataan ibu Siti Nurbaya dapat dipahami bahwa kunjungan yang dilaksanakan oleh Seksi Pengembangan Usaha Industri ke Rumah Batik Andalan bukan dalam rangka melaksanakan pengembangan dalam peningkatan

kemampuan para pengrajin melainkan pengembangan dalam bentuk promosi, dengan pernyataan ibu Siti Nurbaya yang mengatakan bahwa kadang Dinas meminjam kain batik mereka untuk dibawa pameran dan perlombaan.

Hasil dari observasi yang peneliti lakukan serta kesimpulan peneliti untuk indikator pengawasan disini peneliti melihat masih cukup telaksana, karena pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan belum terlaksana dengan baik, sebab Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan hanya sekedar berkunjung ke Rumah Batik Andalan. Tetapi untuk kunjungan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan sudah terlaksana dengan baik. Dan dari hasil kunjungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan sudah melaksanakan pengembangan yaitu dibidang promosi.

Untuk mengetahui bagaimana rekapitulasi dari 15 responden yang telah peneliti buat melalui kuisioner yang diberikan kepada responden terhadap Pelaksanaan Tugas Pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan (Studi Industri Batik Bono) sebagai berikut:

Tabel V.VII : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono).

No	Indikator	Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	Skor	Kategori
1	Pembinaan	-	56	17	73	Kurang Terlaksana
2	Fasilitasi Sarana dan Prasarana	-	10	40	50	Kurang Terlaksana
3	Pengawasan	9	42	21	72	Kurang Terlaksana
Skor		195				
Kategori		Kurang Terlaksana				

Sumber : Olahan Peneliti, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat rekapitulasi tanggapan responden pada penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono) dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian ini berada pada kategori **Kurang Terlaksana** dengan total skor secara keseluruhan sebesar 195 skor ini sesuai dengan penjelasan didepan rentang skoring sebesar 223-133 masuk kedalam kategori **Kurang Terlaksana**.

C. Hambatan-Hambatan Dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono).

Dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan tidak ada satupun yang berjalan dengan lancar dan mulus meskipun sudah tercapai target ataupun sasarannya. Akan tetapi besar atau kecilnya, banyak atau sedikitnya pasti mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan dengan adanya hambatan-

hambatan tersebut maka akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang baru dalam hal pengembangan industri. Sehubungan dengan hal tersebut, proses pelaksanaan pengembangan industri Batik Bono masih mengalami kendala-kendala dalam proses pencapaian pengembangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis akan menjelaskan secara umum berbagai kendala-kendala yang ada ataupun pernah terjadi dalam proses pelaksanaan pengembangan pada Industri Batik Bono :

1. Pada kegiatan pengembangan industri ada beberapa masalah seperti belum adanya tanah hibah dari PT.RAPP untuk pembangunan SIKIM.
2. Kurang maksimalnya pembinaan yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam proses pembuatan batik yang masih banyak motif batik yang mencontoh dari internet.

BAB VI PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan yang telah peneliti lakukan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono), maka dapat penulis ambil kesimpulan dan saran untuk bahan masukan bagi pihak terkait terutama bagi seksi pengembangan industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Untuk indikator pembinaan, berada pada kategori kurang terlaksana berdasarkan tanggapan dari responden dan observasi peneliti, karena dalam melakukan Melakukan kegiatan analisis permasalahan IKM, penentuan solusi dari permasalahan yang terjadi di RBA, serta dalam melakukan perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi di RBA sudah dilakukan namun masih tidak sesuai dengan SOP Pembinaan.
2. Untuk indikator fasilitas sarana dan prasarana berdasarkan data rekapitulasi termasuk kedalam kategori kurang terlaksana. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Tidak pernah memberikan bantuan perlengkapan dan peralatan kepada Industri Batik Bono, jika dilihat pada SOP Pembinaan Industri Kecil Menengah sudah dijelaskan bahwa adanya bantuan Bimtek, perlengkapan, dan peralatan serta legalitas usaha. Namun untuk bantuan perlengkapan dan peralatan untuk Industri Batik Bono tidak terlaksana.

3. Untuk indikator pengawasan berdasarkan dari data rekapitulasi berada pada kategori kurang terlaksana. pengawasan sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal seperti adanya membandingkan serta menilai rencana dan hasil kegiatan Industri Btaik Bono serta menganalisis masalah Industri Batik Bono.

Untuk variabel penelitian yaitu Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Industri (Studi Industri Batik Bono) dikategorikan cukup terlaksana, dimana hal ini dapat dilihat pada tabel V.VII yaitu rekapitulasi indikator evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam pengembangan industri (studi industri batik bono) dan hasil obeservasi dari penulis terhadap ketiga indikator penelitian.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan dalam pelaksanaan tugas Pengembangan Industri Kecil Menengah Khususnya Industri Batik Bono dapat lebih meningkatkan kembali pengawasan kepada Industri Batik Bonno agar dapat mengetahui permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh Industri Batik Bono sehingga dapat dilakukannya perbandingan serta menilai rencana, waktu dan hasil dari kegiatan Industri Batik Bono. Yang akhirnya dapat

memberikan solusi atau perbaikan dari permasalahan yang dihadapi oleh Industri Batik Bono.

2. Diharapkan sebagai pelaksana pengembangan Industri Kecil Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan mengadakan pembinaan kepada Industri Batik Bono sesuai dengan tupoksi nya dan bekerja berdasarkan SOP yang telah ada. Mengingat Industri Batik Bono merupakan suatu industri Potensial yang dapat menyerap banyak tenaga kerja, jika bisa dibina dan dikembangkan dengan baik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anwas, M. Oos. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Efendi, Mahrizal. 2003. *Pembinaan dalam organisasi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Fahmi, Irham. 2011. *Manajemen Pengambilan Keputusan*. Bandung: Alfabeta
- Hasibuan, Melayu S.P. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huda, Ni'matul. 2017. *Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kansil dan Cristine. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miftah, Thoha. 2014. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moekijat. 1995. *Manajemen Personalial dan Sumberdaya Manusia*. Bandung: Mandar Maju
- Ndraha, Talizudhuhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2010. *Perencanaan Strategis In Action*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Prajudi, Slamet Atnosurdjo. 1986. *Dasar-Dasar Ilmu Admmministrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Purwaningsih, Endang, dkk. 2018. *UMKM Aspek Hukum dan Manajemen Pemasaran Produk*. Malang: Empatdua.
- Rohman, Abd. 2018. *Dasar-Dasar Manajemen Publik*. Malang: Empatdua.
- Siagian, P. Sondang. 1981. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Erlangga.
- 2003. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- 2002. *Kegiatan Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT. Asia Maha Satya.
- 2001. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafiee, Inu Kencana. 2018. *Ilmu Adminitrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Zulkifli. 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru:UIR.

Dokumentasi :

UU No. 5 Tahun 1948 tentang Perindustrian

UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

PeraturanBupati Kabupaten Pelalawan No. 70 Tahun 2016 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata KerjaDinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan PerdaganganKabupaten Pelalawan.

Zulkifli. Awan, Azam dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: Fisipol UIR.